

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DANA DESA
(STUDI KASUS PADA KANTOR DESA
PANTAMA KECAMATAN KAJANG
KABUPATEN BULUKUMBA)**

SKRIPSI



**YULIA CAHAYA FATIMA
105721112017**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2022

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DANA DESA
(STUDI KASUS PADA KANTOR DESA
PANTAMA KECAMATAN KAJANG
KABUPATEN BULUKUMBA)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan oleh:

YULIA CAHAYA FATIMA

NIM: 105721112017

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2022/1443 H**

17/01/2022

1 cap
Smb. Alumni

R/0048/MAN/22 0
FAT
P¹

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT skripsi ini penulis persembahkan kepada Mama dan Bapak yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, kerja keras dan cinta kasih yang tiada terhingga.

MOTTO

“Keajaiban adalah nama lain dari kerja keras”

“Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan, dengan bermodal yakin merupakan obat mujarab penumbuh semangat hidup”





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedunglqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Partisipasi Masyarakat Dalam Musyarah
Perencanaan Pembangunan Dana Desa (Studi Kasus
Pada Kantor Desa Pantama Kecamatan Kajang
Kabupaten Bulukumba)

Nama Mahasiswa : Yulia Cahaya Fatima

No. Stambuk : 105721112017

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan
panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 11 Desember tahun
2021 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar.

Makassar, 7 Jumadil Awal 1443 H

11 Desember 2021 M

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Ruliaty.,M.M

NIDN : 0009095406

Alamsjah.,ST/SE.,M.M

NIDN : 0920077205

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. H. Andi Jam'an,S.E., M.Si

NBM : 651 507

Muh. Nur Rasyid, SE., MM

NBM : 1085576



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Yulia Cahaya Fatima, NIM: 105721112017, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0014/SK-Y/61201/091004/2021 M, tanggal 7 Jumadil Awal 1443 H/ 11 Desember 2021, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA MANAJEMEN** pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 7 Jumadil Awal 1443 H
11 Desember 2021 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.A
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.A.cc
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Mahmud Nuhung, S.E., MA
2. Muh. Nur R, S.E., M.M
3. Dr. Dg. Maklassa, S.Pd., M.M
4. Sri Andayaningsih, S.E., M.M

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 651507



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulia Cahaya Fatima
Stambuk : 105721112017
program Studi : Manajemen
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa
Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba) Dengan ini
menyatakan bahwa :

Skripsi Yang Saya Ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 7 Jumadil Awal 1443 H
11 Desember 2021 M

Yang membuat pernyataan,



ater

000

Yulia Cahaya Fatima

NIM: 105721112017

Mengetahui,



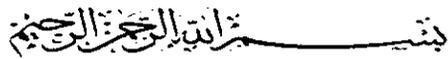
Dekan

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 651507

Ketua Program Studi

Muh. Nur Rasyid, SE., MM
NBM : 1085576

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai mana kala penulisan skripsi yang berjudul **"Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba)"**. Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Rajaning dan ibu Raden yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudariku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muh. Nur Rasyid SE., MM selaku Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Ruliaty., M.M,selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Alamsjah., ST., S.E., M.M, selaku pembimbing II yang telah berkenaan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Terimakasih kepada para Aparat Desa Pantama yang senantiasa memberikan informasi kepada penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para

pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater kampus biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahifii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum WR.WB

Makassar, 2022

Penulis

Yulia Cahaya Fatima



ABSTRAK

Yulia Cahaya Fatima, 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba). Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Hj. Ruliaty sebagai pembimbing I dan Alamsjah sebagai pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) dan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan dana Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pantama partisipatif dalam kegiatan MUSREMBANG dan Proses pelaksanaan MUSREMBANG dilakukan secara sistematis berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan.

Kata kunci : Partisipasi ,MUSREMBANG

ABSTRACT

Yulia Cahaya Fatima, 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba). Management Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Hj. Ruliaty as supervisor I and Alamsjah as supervisor II.

The purpose of this study was to determine community participation in the implementation of the Development Plan Deliberation (Musrembang) and the process of implementing the development planning of the Pantama Village Fund, Kajang District, Bulukumba Regency.

This study uses a qualitative descriptive research method with data collection techniques through interviews. The results showed that the community of Pantama Village was participatory in MUSREMBANG activities and the process of implementing MUSREMBANG was carried out systematically and ran smoothly in accordance with the provisions.

Keywords: Participation, MUSREMBANG



DAFTAR ISI

SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II.....	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Tinjauan Teori	4
1. Partisipasi Masyarakat.....	4
2. Perencanaan Pembangunan.....	8

3. Musrembang	10
4. Musrengbangdes	13
B. Studi Empiris	16
C. Kerangka Pikir	19
BAB III	20
METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Lokasi Penelitian	20
C. Pengumpulan data	20
D. Informan	21
E. Populasi dan Sampel	22
F. Teknik Analisis Data	23
G. Instrumen Penelitian	24
H. Pengujian Kredibilitas Data	24
BAB IV	26
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Deskripsi Objek Penelitian	26
1. Sejarah Desa Pantama	26
2. Profil Desa Pantama	27
4. Visi dan Misi	53
5. Struktur Organisasi	55
6. Job Deskripsi	56
B. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	58
C. Arah Kebijakan Keuangan	62
D. Program dan Kegiatan Desa	67

E. Hasil Penelitian	78
F. Pembahasan Hasil Penelitian.....	83
BAB V	88
KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

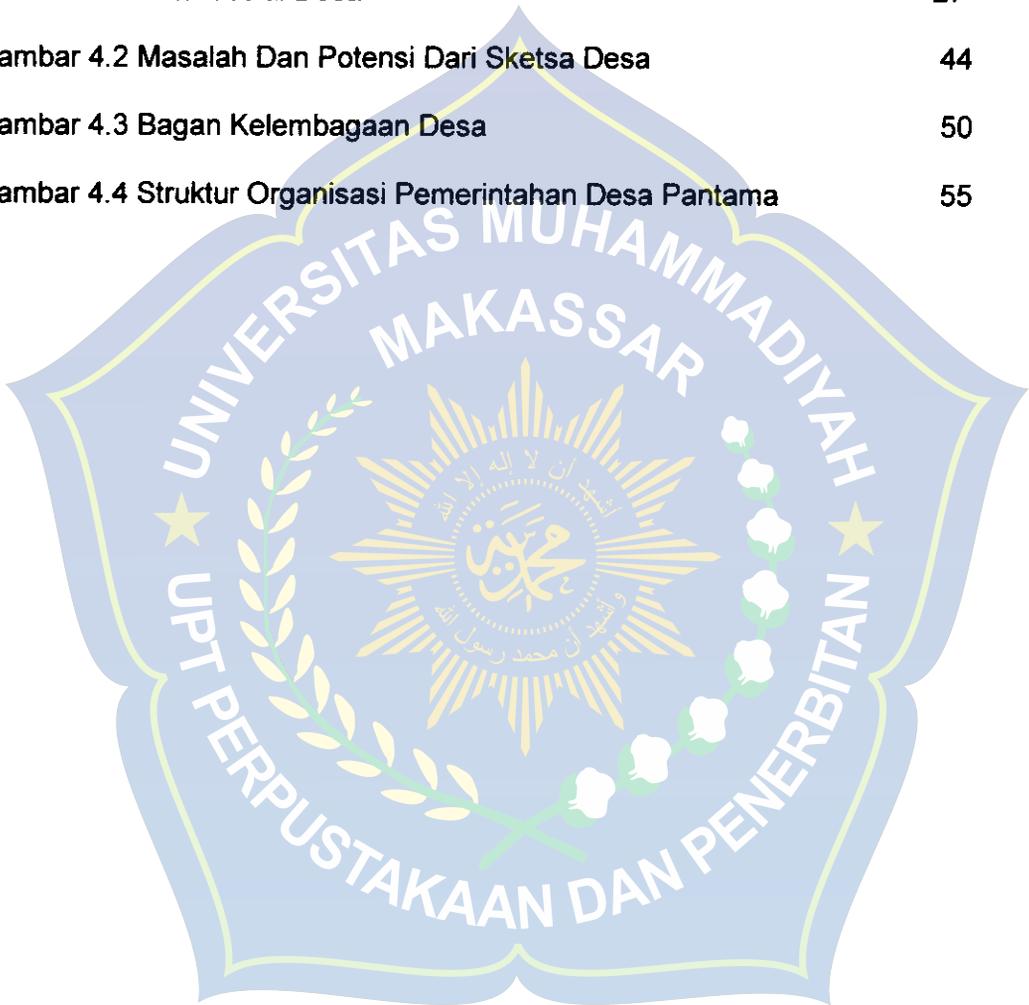


DAFTAR TABEL

Nomor & Judul	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Demografi Desa Pantama	30
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	30
Tabel 4.3 Sumber Daya Alam	30
Tabel 4.4 Sumber Daya Manusia	31
Tabel 4.5 Aset Desa	31
Tabel 4.6 Masalah Desa Pantama	33
Tabel 4.7 Potensi Desa Pantama	40
Tabel 4.8 Daftar Masalah dan Potensi Desa Pantama dari sketsa desa	44
Tabel 4.9 Masalah Dan Potensi Dari Kelembagaan Desa	51
Tabel 4.10 Program Desa Pantama	67
Tabel 4.11 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pantama	73

DAFTAR GAMBAR

Nomor & Judul	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Tahapan Musrenbang	12
Gambar 2.2 Kerangka Pikir	19
Gambar 4.1 Peta Sosial Desa	27
Gambar 4.2 Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa	44
Gambar 4.3 Bagan Kelembagaan Desa	50
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pantama	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan agenda utama pemerintah sejak kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai pembangunan tersebut maka diharapkan campur tangan atau keterlibatan beberapa unsur didalamnya yang dimana salah satunya unsur yang sangat diharapkan adanya partisipasi dari masyarakat yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk tingkat Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bisa menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan, pembangunan yang bisa dilakukan di daerah pedesaan adalah dengan

memberdayakan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sangat efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan di tingkat desa sudah sejak lama digulirkan dengan adanya bantuan dari pemerintah yaitu dengan alokasi dana desa yang diambil dari 10% dana APBD, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka pembangunan desa bisa dilakukan dengan dana desa. Dari jumlah total anggaran dana desa, dengan adanya dana desa ini maka setiap desa wajib melakukan pembangunan desa .

Partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa merupakan program desa untuk pembangunan desa secara berkelanjutan, atau asosiasi global yang melibatkan pihak lembaga pemerintah, LSM maupun sektor swasta dan masyarakat setempat secara bersama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan pembangunan desa melalui sarana-sarana fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul: **Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dana Desa Pantama Kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba ?

2. Bagaimana proses pelaksanaan perencanaan pembangunan dana Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perencanaan pembangunan dana Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Penelitian ini akan menjadi pendukung bagi penelitian selanjutnya yang akan membahas mengenai partisipasi masyarakat desa dalam musrebangdesa.
2. Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah desa Pantama, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dalam pengambilan keputusan Musrebangdes selanjutnya.
3. Penelitian ini akan menambah wawasan dan dapat menjadi kajian akan pentingnya masyarakat dalam pengambilan keputusan Musrebangdes agar proses pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Partisipasi Masyarakat

Istilah partisipasi diserap dari bahasa asing participation, yang memiliki arti mengikutsertakan pihak lain. Sedangkan, dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata partisipasi memiliki arti yakni perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; dan peran serta. Konsep partisipasi sendiri dalam perkembangannya memiliki pengertian yang beragam, tetapi memiliki persamaan dalam beberapa hal. Menurut Adiasmita (dalam Latif, Rusdi, Mustanir & Sutrisno, 2019) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat terdiri dari beberapa hal dalam program pembangunan diantaranya, pemberdayaan masyarakat, peran dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Selain itu partisipasi masyarakat juga merupakan aktualisasi, kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah.

Menurut (A Mustanir & Razak, 2017) (A. Mustanir & Yasin, 2018) (A.D Mustanir, 2016) (A. Mustanir, 2017) (A. Mustanir 2018), partisipasi yang sesungguhnya adalah partisipasi yang menghasilkan pemberdayaan, yaitu partisipasi yang merupakan sebuah tujuan dalam proses demokrasi, berasal dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat dan dikelola dalam masyarakat. Sedangkan Mubyarto (dalam Laily, 2015) mengungkapkan bahwa partisipasi merupakan kesediaan masyarakat

untuk membantu keberhasilan setiap program pemerintah sesuai dengan kemampuan diri tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Sedangkan Arimbi (dalam Laily,2015) mendefinisikan bahwa partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback information* yang merasakan dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut (Laily,2015).

Menurut Juliantara (dalam Deviyanti,2013) mengartikan partisipasi sebagai kebebasan berbicara dan keterlibatan setiap warga Negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan yang mewakili kepentingan untuk berperan aktif berpartisipasi secara konstruktif. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam beberapa tahap mulai dari (1) proses mengidentifikasi masalah dan potensi; (2) proses pemilihan dan pengambilan keputusan sebagai alternatif solusi untuk menangani masalah yang ada; (3) proses pelaksanaan dalam mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses melakukan evaluasi dari kebijakan yang diterapkan (Deviyanti,2013).

Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses kepesertaan seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan dimulai dari tahap memberikan masukan, membuat keputusan dalam proses perencanaan , dan pengelolaan pembangunan termasuk didalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, mengevaluasi hasil pembangunan dan merasakan manfaat yang diperoleh dari proses pembangunan.

Maka dari itu, partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam proses perencanaan pembangunan, sejalan dengan pendapat

yang dikemukakan (A. Mustanir, 2015), menegaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan dalam memetik hasil atau manfaat pembangunan adalah suatu partisipasi nyata.

Selain itu partisipasi itu berproses dan untuk membedakan prosesnya dibuatlah tingkatan partisipasi. Teori tingkat partisipasi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembobolan terhadap tolak ukur tingkat partisipasi masyarakat. Konsep tingkat partisipasi dari berbagai teori dan pengalaman dalam bidang perencanaan partisipatif. Maka dari itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi dalam masyarakat, (Satrias,2011) menawarkan sebuah teori yang dinamakan sebagai teori *the ladder of participation*. Teori ini menyatakan terkait tahapan-tahapan dalam proses partisipasi masyarakat. Arnstein dalam teorinya membagi partisipasi menjadi delapan tahap sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat.

Adapun faktor pendukung Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menurut (Sari, 2016) terdiri dari

1. Faktor kesadaran/ kemauan yakni keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri.
2. Adanya partisipasi masyarakat yakni partisipasi yang didorong oleh solidaritas yang tinggi diantara sesama anggota masyarakat sehingga keikutsertaan mereka berasal dari perwujudan bersama, bukan karena

dorongan hati nurani sendiri. Ini merupakan kondisi sosial budaya masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.

3. Adanya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dukungan dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun warga secara umum.

Sedangkan, faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menurut (Sari 2016), yaitu:

1. Rendahnya kualitas pendidikan sarana pendidikan masyarakat di desa cenderung rendah.
2. Tingkat pendapatan yang rendah produktivitasnya yang sangat rendah.
3. Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan Indonesia sebagai Negara agraris sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilnya serta menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian.

Menurut Marshal (2006) Partisipasi masyarakat diukur melalui indikator berikut :

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat.

Tersedianya forum atau media untuk menampung partisipasi masyarakat. Forum atau media ini akan memudahkan masyarakat untuk memberikan partisipasinya beserta akan meningkatkan partisipasi tersebut.

2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses.

Masyarakat mampu dalam terlibat proses terjadinya partisipasi. Ini juga berarti masyarakat harus memiliki kemampuan atau keahlian pada saat terlibat dalam partisipasi.

3. Adanya akses bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Masyarakat diberi akses dalam menyampaikan pendapatnya saat proses pengambilan keputusan. Akses ini mengandung arti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam area *Good Governance* yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif dalam mengelola barang publik.

2. Perencanaan Pembangunan

a. Pengertian Perencanaan

Pembangunan partisipatif dimulai dari tahap perencanaan. Perencanaan diperlukan karena adanya kelangkaan/keterbatasan sumber daya termasuk sumber dana yang tersedia sehingga mengharuskan mempertimbangkan skala prioritas dalam menentukan suatu pilihan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang dikerjakan. Pengertian perencanaan memiliki banyak makna sesuai pandangan masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat secara umum, (Sari,2016).

Pada UU No.25 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan

sumber daya yang tersedia. Sedangkan (Sari,2016) mengungkapkan perencanaan merupakan suatu proses mencapai suatu tujuan tertentu dengan mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sistematis. Oleh karena itu pada hakikatnya terdapat pada setiap jenis usaha manusia.

Sementara itu (Laily,2015) mengungkapkan bahwa perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang ditentukan.

Fungsi perencanaan antara lain untuk menetapkan arah dan strategi serta titik awal kegiatan supaya dapat membimbing dan memperoleh ukuran yang dipergunakan dalam pengawasan agar tercegah dari pemborosan waktu dan produksi lainnya (Satries,2011).

b. Pengertian Perencanaan erencanaan Pembangunan

Menurut (Ariadi,A .2019) perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses perumusan alternatif-alternatif yang berdasarkan data-data yang digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu kegiatan kemasyarakatan. Sedangkan (Azhar,2015) mengungkapkan bahwa perencanaan pembangunan termasuk sumber ekonomi yang terbatas adanya yang untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien .

Menurut (Mustanir et al. 2018) menggambarkan perencanaan pembangunan sebagai cara untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Sedangkan, mendefinisikan perencanaan pembangunan

suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif.

Perencanaan pembangunan menurut (Satries, 2011) dilakukan dengan maksud ingin merumuskan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Tujuan akhir yang dikehendaki,
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk jangka waktu dalam mencapai sasaran tersebut
3. Masalah-masalah yang dihadapi
4. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
5. Kebijakan-kebijaksanaan untuk melaksanakannya
6. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
7. Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaannya.

3. Musrembang

Setiap daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerah harus secara sistematis, terarah, dan terpadu serta tanggap terhadap perubahan sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Adapun jenjang perencanaan jangka panjang selama 25 tahun, jangka menengah selama 5 tahun maupun jangka pendek selama 1 tahun. Selain itu,

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bab VII pasal 150 bahwa daerah wajib memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). (Satries,2011)

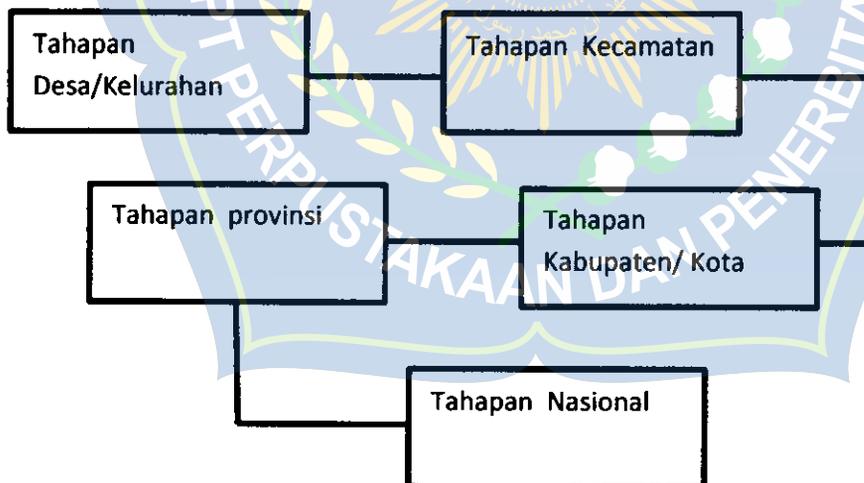
Mustanir mengemukakan bahwa Musrenbang adalah forum yang melibatkan banyak pihak secara bersama untuk mengidentifikasi dan menentukan proses kebijakan pembangunan masyarakat (Mustanir & Abadi, 2017). Secara umum tujuan penyelenggaraan musrenbang yakni Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (RKPD). Kemudian, mengidentifikasi dan membahas isu-isu atau permasalahan pembangunan dalam pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan.

Proses perencanaan partisipatif, prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang sebagai bagian penting untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Sebuah kesepakatan dapat tercapai kalau semua pihak yang berkepentingan hadir dalam proses Musrenbang dan memberikan masukan apa yang menjadi aspirasinya (Maryam,2015). Maka Musrenbang perlu memiliki karakter sebagai berikut:

1. Demand driven process yakni peranan besar dalam menentukan keluaran hasil musrenbang berasal dari aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang.

2. Bersifat inkusif yakni musrenbang memberikan dan melibatkan pihak-pihak terkait dalam menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil mustenbang melalui penyampaian masalahnya.
3. Proses berkelanjutan yakni bagian integral dari proses penyusunan rencana daerah (RKPD) .
4. Bersifat strategic thinking process yakni proses pembahasan dalam musrenbang disusun secara terstruktur, dipandu, dan difasilitasi sesuai alur pemikiran strategis untuk mencapai hasil keluaran nyata.
5. Bersifat partisipatif yakni hasil yang diputuskan berasal dari kesepakatan bersama peserta musrenbang.

Melalui mekanisme ini diharapkan dapat menghasilkan suatu perencanaan pembangunan secara proporsional sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat. Berikut beberapa tahapan Musrenbang yang bertingkat, yaitu :



sumber (Paselle,2013).

Gambar 1.1
Struktur Tahapan Musrenbang

4. Musrengbangdes

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , Pemerintah Desa Untuk menetapkan prioritas pembangunan, program atau kegiatan yang akan dijalankan, serta berbagai kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Swadaya masyarakat desa, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota. (Mustanir & Razak, 2017). Sementara menurut Djohani mengungkapkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa direncanakan yang diselenggarakan oleh lembaga public, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran untuk membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara melihat potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Proses Musrenbang bukan suatu acara seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato. Inti dari Musrenbang adalah partisipasi aktif warga. Musrenbang desa akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri atas keterwakilan wilayah, keterwakilan berbagai sektor, keterwakilan tiga

unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, kalangan swasta /bisnis, masyarakat umum), dan keterwakilan organisasi desa dalam upaya membangun desa melalui musrenbang desa.

Adapun Tujuan Musrenbang Desa yaitu:

1. Menyusun dan menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa.
2. Menyepakati tim Delegasi desa yang akan memaparkan persoalan yang ada di dasarnya pada forum musrenbang tingkat kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah (SKPD) tahun berikutnya.

Proses Umum Tahapan Musrenbang Desa dari Beberapa tahapan, diantaranya:

1. Pra-Musrenbang Desa

Dalam tahapan pra-Musrenbang Desa terdiri atas pengorganisasian Musrenbang, dengan membentuk tim penyelenggara Musrenbang (TPM), Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang desa oleh TPM (2-3 orang) dan persiapan teknis pelaksanaan musrenbang desa. Setelah itu, akan dilakukan pengkajian desa secara partisipatif yang terdiri atas kegiatan-kegiatan mengkaji kondisi, permasalahan, dan potensi desa (per dusun/RW dan/per sector/isu pembangunan) bersama warga masyarakat penyusunan data atau informasi desa dari hasil kajian oleh tim pemandu.

2. Tahapan Pelaksana Musrenbang Desa

Tahapan pelaksana dibuka dengan pembukaan, Setelah itu. Paparan dan diskusi dengan narasumber (diskusi panel) sebagai masukan untuk musyawarah dengan pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoalan desa. Kemudian pemaparan kepala desa mengenai hasil evaluasi RKP Desa yang sudah berjalan, Kerangka prioritas program menurut RPJM Desa , informasi perkiraan ADD dan sumber anggaran lain untuk tahun yang sedang direncanakan. Setelah itu, pemaparan pihak kecamatan, UPTD/SKPD kecamatan mengenai kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan. terakhir tanggapan dan diskusi bersama warga masyarakat.

3. Tahapan Pasca-Musrenbang Desa

Rapat kerja tim perumus hasil Musrenbang desa dengan menerbitkan SK Kades untuk tim Delegasi Desa, penyusunan daftar prioritas masalah desa untuk disampaikan di Musrenbang kecamatan, dan penyusunan RKP Desa sampai menjadi SK Kades (berdasarkan SAP dan Permendagri No.66/2007) atau peraturan kades (berdasarkan PP No. 72/2005), selain itu akan dilakukan Pembekalan Tim delagasi desa oleh TPM (Termasuk Tim Pemandu). Terakhir , melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

B. Studi Empiris

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang konsep perencanaan dan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengambilan keputusan pemerintah dalam perencanaan pembangunan desa.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

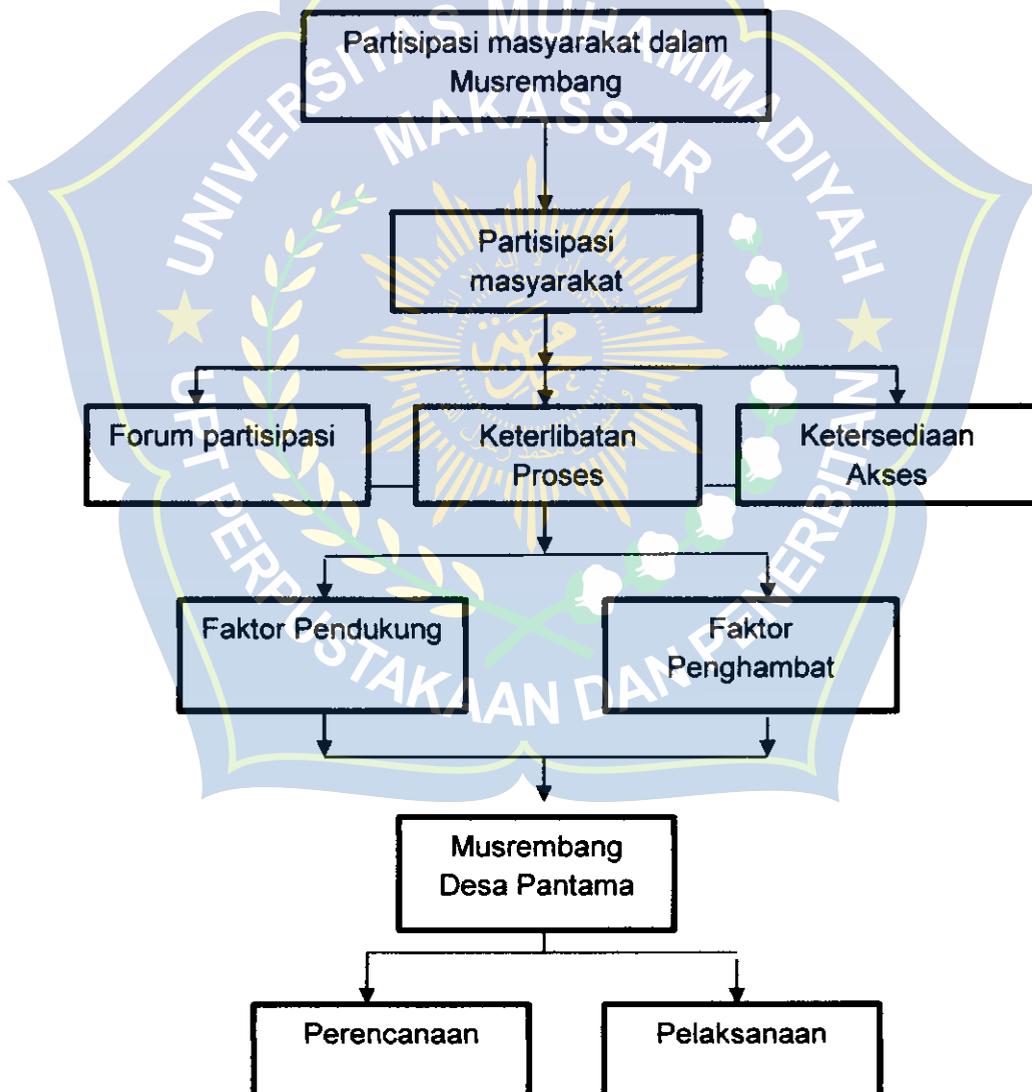
No	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Elda Imro'atin Nur Laily.(2015)0	Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.	Metode Penelitian Deskriptif, Kualitatif dengan menggunakan kuesioner.	Bahwa Partisipasi Perencanaan pada Pembangunan perluasan pasar di Desa Sugio, dapat dikategorikan kurang baik. Beberapa hal yang membuat partisipasi masyarakat kurang baik yakni belum adanya pedoman di daerah tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif, kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan selama ini.
2.	Fikri Azhar (2015)	Partisipasi masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan	Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif ,	Hasil penelitian pada masyarakat di Kelurahan Pegirian kurang baik sebagaimana yang

		Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya	kualitatif	terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam musrenbang kelurahan pengumpulan usulannya yang diperoleh dari masyarakat hanya pada proses menampung dan menerima usulan tersebut., pada proses pembahasan usulan masyarakat tidak terlalu dilibatkan. Masyarakat tidak mengetahui usulan yang mana menjadi usulan prioritas. masyarakat tidak memiliki ruang penuh untuk dapat menentukan usulan prioritas tersebut.
3.	Hadi Suroso, Abdul Hakim, dan Irwan Noor	Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa banjaran kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik	Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat derajat partisipasi masyarakat masih dalam tahap penentraman di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Sedangkan dari beberapa faktor internal dan eksternal yang diuji menunjukkan bahwa faktor usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lamanya tinggal di desa tidak mempunyai hubungan yang berarti dengan derajat partisipasi.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta memperjelas alur pemikiran dalam penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif biasanya disebut juga dengan metode penelitian naturalistic, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Natural Setting), disebut juga dengan metode kualitatif karena data yang digunakan dan terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Pantama Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba, dan waktu penelitiannya pada Bulan Agustus-September 2021.

C. Pengumpulan data

Berdasarkan riset penelitian ini untuk pendekatan penelitian menggunakan dan mengumpulkan data sekunder dan data primer peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data yaitu (Ahmad,2015)

1. Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian ini. Pengumpulan data observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh valid dan tidak mengada-ngada. Dengan melakukan observasi peneliti mencatat apa saja yang dilihat untuk memberi gambaran secara utuh pada objek yang diteliti
2. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui (Ahmad,2015).kuisioner pada

3. penelitian ini diberikan atau diberikan secara langsung kepada masyarakat.
4. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara di penanya atau pewawancara dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (Ahmad,2015).
5. Studi Pustaka adalah suatu kegiatan membaca dan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan indikator penelitian,baik melalui buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu
6. Studi Dokumentasi yaitu berupa data data atau dokumen dokumen yang berkaitan dengan proses musyawarah pembangunan desa pada Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
7. *Internet searching* merupakan riset untuk mengumpulkan data dari referensi lainnya.

Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala dan proses sosial.

D. Informan

Adapun yang akan menjadi Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan aparat Desa Pantama Kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba

2. Tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari 6 orang masing-masing 2 setiap dusun yang ada di Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
3. Tokoh-tokoh pemuda (17-25 Tahun) yang terdiri 6 orang, masing-masing 2 orang setiap dusun yang ada di Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan subjek penelitian. Menurut (Ahmad,2015). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Sesuai dengan observasi diatas maka peneliti mengambil populasi pada Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2011), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah sampling digunakan peneliti adalah sampling insidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Ahmad,2015).

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis data yang terdapat tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan penraformasian “ data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan tertulis. Reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif.

2. Model Data (Data Display)

Setelah data direduksi, selanjutnya melakukan kegiatan analisis data yaitu model data. Model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang memperbolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sedangkan model dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda. Dari pengukur bensin, surat kabar, sampai layar komputer. Melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis lanjutan atau tindakan didasarkan pada pemahaman tersebut.

3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis data adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal dan proposisi-proposisi.

Peneliti melakukan perumusan pada kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan sementara yang dilakukan dengan cara mensintesis semua

data yang terkumpul. Data akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Instrumen Penelitian

Penelitian ini yang menggunakan metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, maka peneliti adalah sebagai Instrumen kunci.

Penggunaan peneliti sebagai instrumen peneliti guna mendapatkan data yang *valid* dan *reliabel*. Namun untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaannya, peneliti juga didukung oleh instrument pembantu seperti panduan wawancara. Adapun langkah-langkah penyusunan wawancara yaitu, peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan informan yang ingin diwawancarai
2. Menyiapkan topic-topik masalah yang akan jadi pembicaraan
3. Membuka atau mengawali wawancara
4. Mengkonfirmasi intisari dari wawancara dan mengakhirinya
5. Menuliskan wawancara ke dalam catatan lapangan
6. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh.

H. Pengujian Kredibilitas Data

uji kredibilitas data atau kepercayaan data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif serta *member check*. Digunakan uji ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai subyek penelitian (Sugiyono 2018).

1. Triangulasi

Menurut (sugiyono 2015) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, peneliti mengecek data baik dari informan kunci dan informasi biasa, bacaan referensi dan lain sebagainya, dilakukan dengan berbagai teknik yang berbeda-beda guna mendapat informasi dan dilakukan pada berbagai waktu yang memungkinkan jawaban tidak berdasarkan pada kelelahan dan lain sebagainya.

2. Analisis Kasus Negatif

Kasus negative menurut (sugiyono 2015) adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dan bertentangan, bila tidak ada yang berbeda berarti data dapat dipercaya.

Peneliti melakukan pengecekan apakah benar Musrenbangdes ada berjalan di Gampong *Alue Wakie*, benar atau tidak, dengan data positif ada kira-kira 99% sedangkan data yang mengatakan tidak ada 1% , maka dengan adanya kasus negative ini peneliti justru harus mencari tahu secara mendalam.

3. Mengadakan *Membercheck*

Member Check menurut (sugiyono,2015) adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada penerima data untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Peneliti perlu mengadakan *member check* dalam penelitian ini guna mengetahui informasi yang akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Pantama

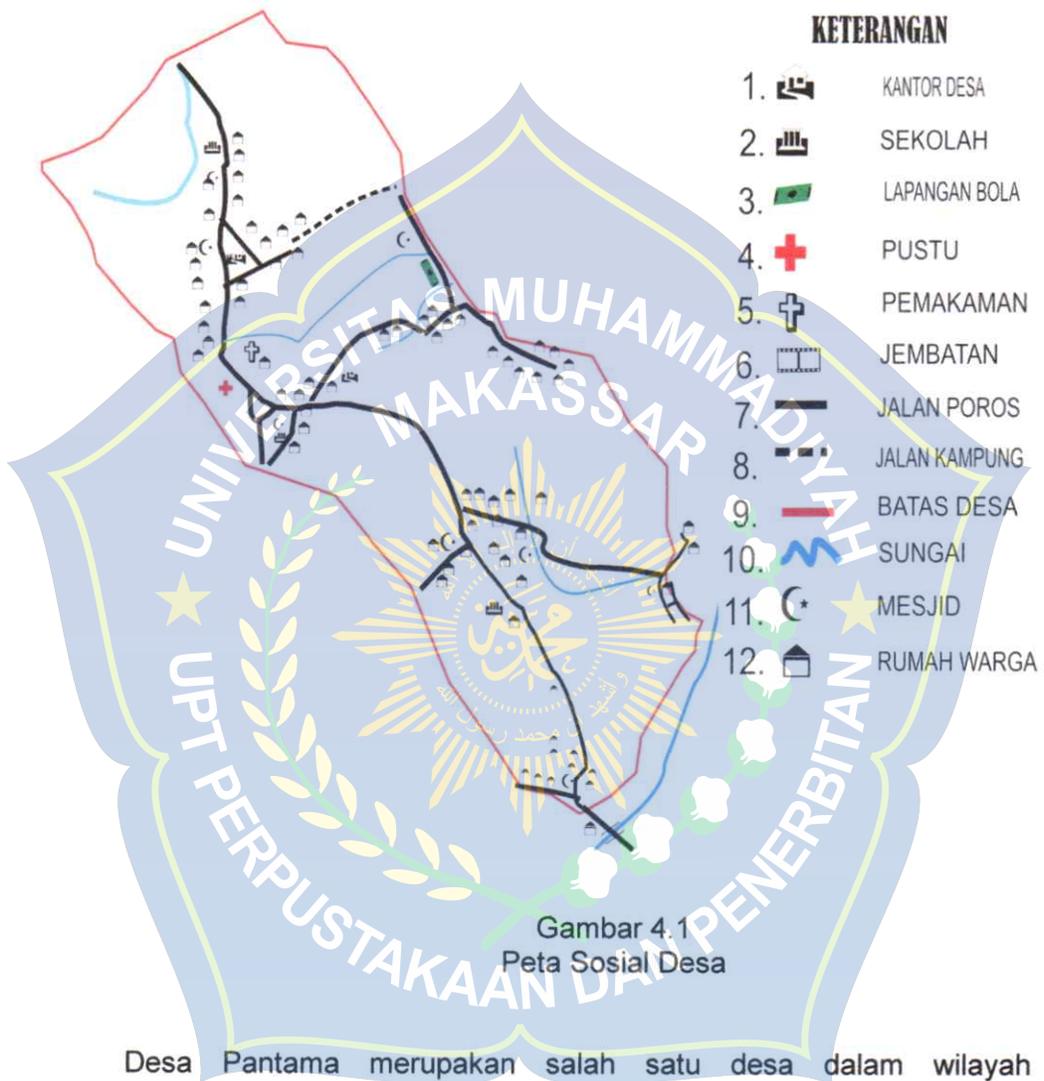
Desa Pantama adalah salah satu dari 17 desa yang ada di Kecamatan Kajang, yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Possi Tanah sebagai Desa induk pada tahun 2000. Kepala desa pertama adalah Mappi Bali di Tahun 2003 – 2004 dan tahun 2004 Ali Daeng Tojeng yang menjabat selama 2 periode tahun 2004 – 2014, 2014 – 2020 Muhammad Asis.

Jauh sebelum Kabupaten Bulukumba menjadi sebuah Kabupaten pada tahun 1959, Desa Pantama sudah ada, Hanya saja Desa Pantama tersebut masih merupakan pemerintahan berdasarkan adat istiadat yang digelar Galla Pantama. Galla Pantama merupakan salah satu dari Adat Lima Karaeng Tallu dalam struktur kepemimpinan adat Ammatoa. Sebagai adat Lima Galla Pantama memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan Adat Ammatoa. Galla Pantama diberikan kewenangan dan tugas untuk membidangi pertanian, Sehingga berkuasa untuk menentukan masa tanam bagi seluruh warga dalam wilayah adat Ammatoa. Selain itu, bersama dengan Galla lombo, jg bertugas untuk menjalankan pemerintahan yang sifatnya administratif yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan pemerintah Hindia-Belanda pada masa penjajahan

2. Profil Desa Pantama

a. Letak Geografis dan Demografis

1. geografis



Sebelah Utara : Desa Lolisang : Kajang

Sebelah Selatan :Lembang Lohe : Kajang

Sebelah Timur :Teluk Bone : Kajang

Sebelah Barat :Possi Tanah : Kajang

Luas wilayah Desa Pantama adalah 410 hektar yang terdiri dari 40% berupa pemukiman, 25% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, serta 35% berupa lahan budidaya perikanan. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Pantama mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya.

Jarak pusat desa dengan ibu kota kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 60 km. Kondisi prasarana jalan poros desa yang masih berupa jalan konstruksi lapen dengan kondisi rusak parah mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 60 menit. Sedangkan jarak pusat desa dengan ibu kota kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 3 km.

Desa Pantama merupakan wilayah paling potensial untuk usaha budidaya ikan air tawar. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta sistem pengairan yang baik. Dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan potensi budidaya perikanan diwujudkan dengan menetapkan wilayah Desa Pantama sebagai bagian Kawasan Minapolitan. Berdasarkan kondisi desa ini maka akan dijabarkan permasalahan,

potensi, hingga daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang diprogramkan untuk 6 (enam) tahun

Diketahui Desa Pantama juga masih termasuk daerah kawasan adat dikarenakan masyarakat Desa pantama termasuk dalam salah satu daerah yang masih memegang teguh peraturan adat istiadat di Kajang. Tokoh adat atau pemuka adat di Desa Pantama di gelar sebagai "Galla Pantama". Desa Pantama berada dalam Kecamatan Kajang dan terdiri dari 8 Dusun yaitu :

1. Dusun Kajang keke
2. Dusun Balangpangi 1
3. Dusun Balangpangi 2
4. Dusun Koli-koli
5. Dusun Labojo 1
6. Dusun Labojo 2
7. Dusun Rowa
8. Dusun Lengang

2. Demografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Pantama adalah 2.671 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.
Demografi Desa Pantama

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	1.282
2.	Perempuan	1.389
3.	Kepala Keluarga	664

Sumber : Profil Desa Pantama

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 Bln – 12 Bln	35
2.	12 Bln – 4 Thn	142
3.	5Thn – 14 Thn	457
4.	15 Thn – 39 Thn	944
5.	40 Thn – 64 Thn	950
6.	65 Thn tahun keatas	143
	Jumlah	2.671

Sumber : Profil Desa Pantama

b. Sumber Daya

1. Sumber Daya Alam

Tabel 4.3
Sumber Daya Alam

No	Sumber Daya Alam
1.	Perikanan
2.	Sungai

3.	Lahan perkebunan
4.	Tanaman perkebunan : Kelapa, pisang, Kakao, Umbi umbian,
5.	Tambak
6.	Peternakan

2. Sumber Daya Manusia

Tabel 4.4
Sumber Daya Manusia

No	Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1282	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1398	Orang
	c. Jumlah Kepala keluarga	664	Orang
2.	Sumber utama penghasilan penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	518	Orang
	b. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	21	Orang
	c. Angkutan umum, pergudangan, dan komunikasi		
	d. Jasa	3	Orang
	e. Lainnya		

3. Aset Desa

Tabel 4.5
Aset Desa

No	Jenis Aset	Volume	Kondisi	Lokasi
1.	Tanah tanah Kas desa			
2.	Motor Dinas			
3.	Kursi Besi Untuk aula Desa			

4.	Meja Kayu			
5.	Laptop			
6.	Kursi Tamu Kantor Desa			
7.	Air Conditioner (AC)			
8.	Lemari Arsip Surat			
9.	Almari Rak buku			
10.	Kompor gas Kantor Desa			
11.	Proyektor			
12.	Sound System			
13.	Jalan Kabupaten			
14.	Jalan Rabat Beton			
14.	Jembatan			
14.	Jalan Usaha Tani			
15.	Kamera			
16.	Sofa 1 set			
17.	Televisi			
18.	Mesin Jahit			
19.	Printer			
20.	Dan lain lain			

3. Masalah Dan Potensi

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Pantama terdapat berbagai potensi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

a. Masalah

Berdasarkan pengkajian keadaan desa, masalah yang terdapat di Desa Pantama tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.6
Masalah Desa Pantama

No	Bidang	Masalah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan	Adanya warga yang terdata di luar Desa Pantama nama tempat tinggalnya di Desa Pantama
		Keamanan sarana Balai Desa kurang layak
		Kegiatan Pengurus BPD kurang
		Kegiatan Pengurus LPMD kurang
		Kegiatan PKK Kurang efektif
		Kesulitan dalam penyusunan profil Desa
		Komoditas asli Desa Belum Dikenal luas
		Kurangnya kesejahteraan Anggota BPD
		Kurangnya kesejahteraan Anggota Kader Posyandu
		Kurangnya kesejahteraan Anggota LPMD

		Kurangnya kesejahteraan Anggota PKK
		Kurangnya kesejahteraan Anggota TPK
		Kurangnya kesejahteraan Anggota Karang Taruna
		Kurangnya kesejahteraan Guru
		Kurangnya kesejahteraan Kaum
		Kurangnya kesejahteraan Ketua RT
		Kurangnya kesejahteraan Kepala Dusun
		Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya
		Kurangnya kesejahteraan Pengurus GAPOKTAN
		Kurangnya kesejahteraan Pengurus POSKESDES
		Kurangnya kesejahteraan Pengurus TPA
		Kurangnya Kesejahteraan Perangkat Desa
		Kurangnya kesejahteraan Pengurus Kelompok Tani
		Masyarakat belum mengetahui Informasi kemajuan Desa
		Pada musim hujan halaman balai Desa kotor
2.	Pembangunan	Ada beberapa rumah yang belum layak
		Banyak RTM yang putus sekolah

		Banyak rumput tumbuh di jalan
		Beberapa Jalan alternatif sempit dan buntu
		Beberapa Ruas jalan Desa masih Tanah dan berlubang
		Beberapa TPA belum punya gedung
		Gedung Paud Desa Pelindung Jaya Kurang layak
		Hasil panen kurang maksimal
		Hasil Laut kurang maksimal
		Kegiatan Gapoktan kurang maksimal
		Kegiatan Siskamling Sering macet
		Kelompok Tani kekurangan sarana Transportasi
		Keranda sering kotor dan rusak
		Kurangnya Kerjasama antar Desa
		Masih ada keluarga prasejahtera
		Masyarakat kekurangan sarana pertemuan
		Musim Paceklik RTM kekurangan makanan pokok
		Pada Musim Hujan Air merusak Jalan
		Pada musim hujan banyak air menggenang Di Bahu Jalan Desa

		Terjadi sengketa Batas Tanah
		Transportasi lambat
		Tugu Pembatas Desa tidak jelas
		Tugu Pembatas Desa tidak jelas
		Warga Dusun kesulitan dalam mengadakan pertemuan
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Banyak Program kegiatan Gapoktan tidak terlaksana
		Banyak Program kegiatan Karang Taruna tidak terlaksana
		Banyak Program kegiatan Kelompok kesenian tidak terlaksana
		Banyak Program kegiatan Kelompok tani tidak terlaksana
		Banyak Program kegiatan Kelompok Wanita Tani tidak terlaksana
		Banyak Program kegiatan Lembaga Desa tidak terlaksana
		Banyak Program kegiatan Lembaga Masyarakat tidak terlaksana
		Banyak Program kegiatan PKK tidak terlaksana
		Banyak Program kegiatan Risma tidak terlaksana
		Banyak Warga melanggar hukum

		Banyak keluarga kurang sehat
		Banyak Pemuda yang tidak punya ketrampilan
		Banyak Pemuda yang tidak punya ketrampilan bidang elektronik
		Banyak Pemuda yang tidak punya keterampilan perbengkelan
		Banyak Pemuda yang tidak punya keterampilan Pertukangan
		Banyak Petani ikan yang gagal
		Banyak Petani Kekurangan pupuk
		Banyak Peternak yang tidak berkembang
		Banyak PKK yang tidak punya ketrampilan
		Banyak remaja terlambat melaksanakan khitan
		Banyak Rumah tangga yang tidak punya ketrampilan
		Banyak Terjadi Pernikahan Siri
		Kekurangan Tanaman Organik
		Kelompok UEP tidak berkembang
		Petani Jamur Kurang berkembang
		Prestasi Olahraga kurang

b. Potensi

Tabel 4.7
Potensi Desa Pantama

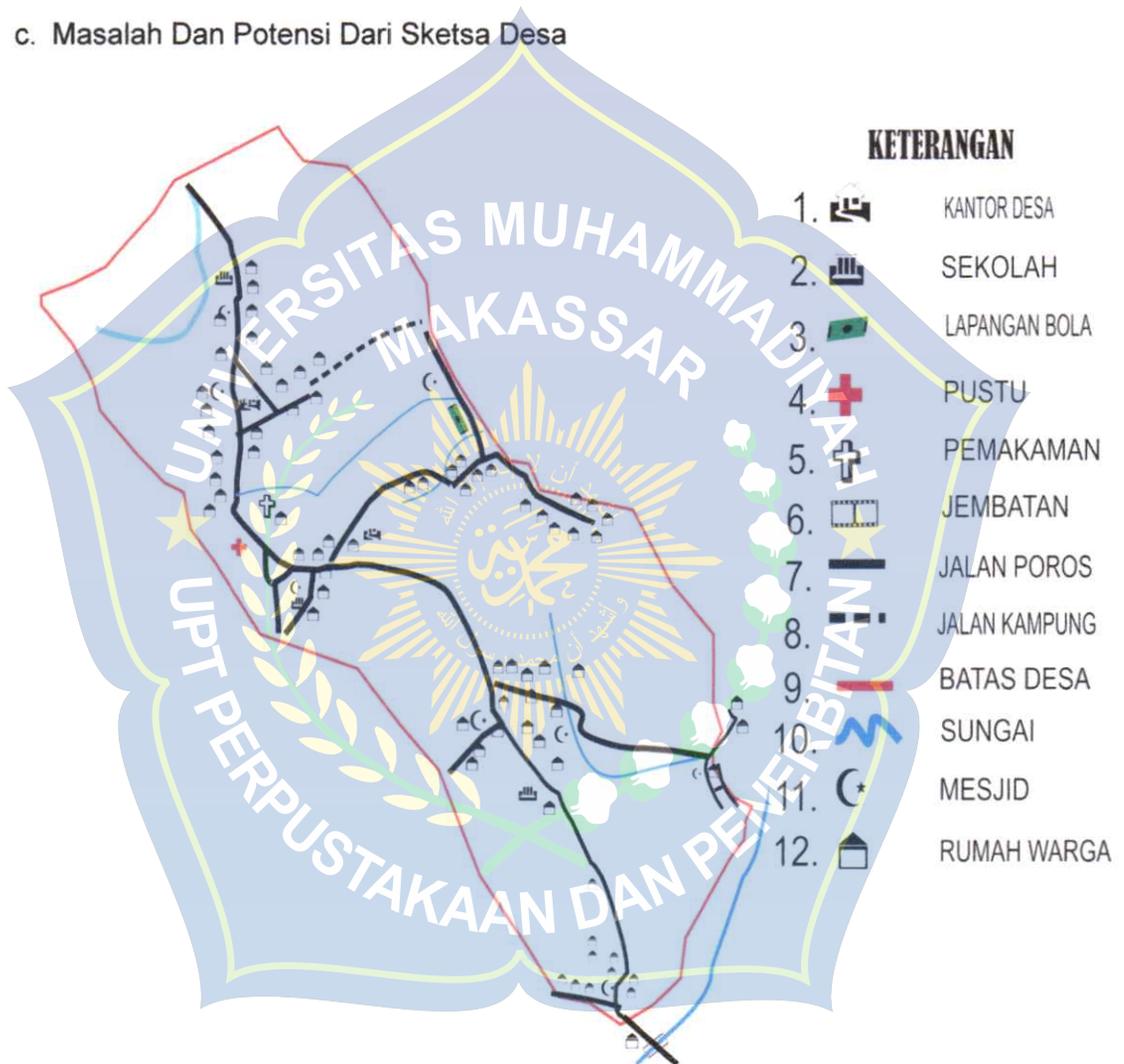
No	Bidang	Potensi
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan	SDM yang memadai
		Perangkat desa
		Pengurus BPD
		Pengurus TPK
		Pengurus TPA
		Pengurus POSKESDES
		Pengurus PKK
		Pengurus Pengurus GAPOKTAN
		Pengurus P3A
		Pengurus LPMD
		Pengurus Kelompok Tani
		Pengurus dan Anggota PKK
		Pengurus dan Anggota LPMD
		Pengurus dan Anggota LINMAS
Pengurus dan Anggota Karang Taruna		
Pengurus dan Anggota Kader Posyandu		

		Pengurus dan Anggota BPD
		PEMDES
		Kantor Desa
		Ketua RT.
		Ketua RK.
		Kaum
		Halaman Tanah
		Balai Desa Lama
		Adanya wilayah
2.	Pembangunan	Anak usia sekolah
		Askes
		Badan Jalan Dan Tenaga Kerja
		Gapoktan
		Jaringan Listrik PLN
		Kader posyandu
		Kelompok ternak
		Lahan dan tenaga kerja
		Parit dan Tenaga kerja

		Pedagang
		Petani dan lahan
		Petani dan Sungai
		Petani Hortikultura
		Petani ikan
		Poskesdes
		Poskesdes, Pustu
		Program Raskin
		Sungai
		Tanah
		Warga dusun
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Bidan, perawat dan Petugas kesehatan
		Lapangan
		Lapangan, Sepak bola
		Lapangan, klub Tenis Meja
		Lapangan, group Volly
		Masjid/ Mushola
		Masyarakat, Polisi, Linmas
		Pos Ronda, Masyarakat

		PKK
		Pupuk kandang, kompos
		Rumah Tangga

c. Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa



Gambar 4.2
Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa

Tabel 4.8
Daftar Masalah dan Potensi Desa Pantama dari sketsa desa

No.	MASALAH	POTENSI
1	Tidak adanya tanda/ciri khas desa berupa tugu dan gerbang batas Desa	Batas Desa Tenaga Kerja
2	Banyaknya sampah berserakan di pemukiman penduduk	Pemukiman Gotong Royong
3	Banyaknya jalan desa di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan	Gotong Royong
4	Akses penerangan jalan desa tidak ada disetiap sudut jalan 8 dusun (Gelap)	Gotong Royong
5	Terhambatnya perjalanan masyarakat untuk membawa hasil tani dari kebun	Lahan perkebunan Tenaga kerja
6	Masih ada warga yang tidak memiliki WC umum	Perumahan warga Tenaga kerja
7	Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni	PKK Kader-Kader di desa Pos Kesehatan Desa
8	Terdapat jalan desa yang tidak memiliki saluran air (8 Dusun) 57 KM	Jalan desa Tenaga kerja
9	Terdapat Masjid rusak sedang dan peralatan dalam masjid tidak lengkap (8 Masjid) Desa Pantama	Masjid Tenaga kerja

10	Banyaknya anak-anak dan lansia yang terkena penyakit dan kurang gizi (gizi buruk)	Pos Kesehatan Desa Posyandu Kader Posyandu
11	Banyaknya lahan/pekarangan rumah penduduk yang tidak termanfaatkan dengan baik	Pekarangan rumah Kader Desa Petani
12	Adanya warga yang terdata di luar Desa Pantama nama tempat tinggalnya di Desa Pantama	Warga desa Data desa
13	Jembatan Dusun Balang Pangi Satu dan Balang Pangi Dua rusak	Jembatan Tenaga kerja
14	Lemahnya peran pengurus Bumdes	Ada kelompok Pengurus lengkap
15	Kurang lengkapnya dokumen kependudukan warga (8 Dusun)	Data desa Pemdes lengkap
16	Terdapat jalan sempit karena terkikis air hujan di jalan Desa (delapan dusun)	Tenaga kerja
17	Minimnya sarana dan prasarana alat penangkap ikan	Laut Kelompok nelayan
18	Minimnya sarana-prasarana dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan dan pengolahan pasca panen	Lahan perkebunan Kelompok tani Hasil panen

19	Sering terjadi luapan air hujan di sungai kali 8 Dusun	Tenaga kerja
20	Hewan ternak berkeliaran dan masuk di kebun milik orang	Pemukiman
21	Mahalnya harga bahan/pakan ternak dan peralatan untuk mengembangkan peternakan	Lahan Peternak
22	Tidak tertibnya baju seragam sekolah dasar dan taman kanak kanak pada murid yang kurang mampu	Anak sekolah
23	Tidak adanya tanda/ciri khas dusun berupa tugu dan gerbang batas Dusun	Batas wilayah dusun Tenaga kerja
24	Tidak ada akses jalan ke kuburan di 3 Dusun	Lahan Tenaga kerja
25	Sulit/mahalnya harga bibit dan pupuk	Lahan Perkebunan Kelompok Tani
26	Tidak adanya jalan penghubung antara Desa Pantama dan desa Lolisang di pinggir pantai	Lahan pemukiman Tenaga kerja
27	jalan desa masih gelap (rawan terjadi kecelakaan dan pencurian ternak	Jalan Desa Tenaga kerja
28	Masih banyak terdapat disabilitas yang perlu mendapat perhatian	Kader Posyandu Posyandu
29	Tidak adanya jalan setapak ke lokasi perumahan warga	Lahan warga Tenaga kerja

5	wabah Penyakit Malaria						**	***	***	*		
6	Diare mewabah			**	***	*****						
7	Campak mewabah	*									***	***
8	Kekurangan Pangan dan penghasilan pada masyarakat								*	**	***	***
9	Kekurangan air bersih untuk minum masyarakat	**				****					**	***

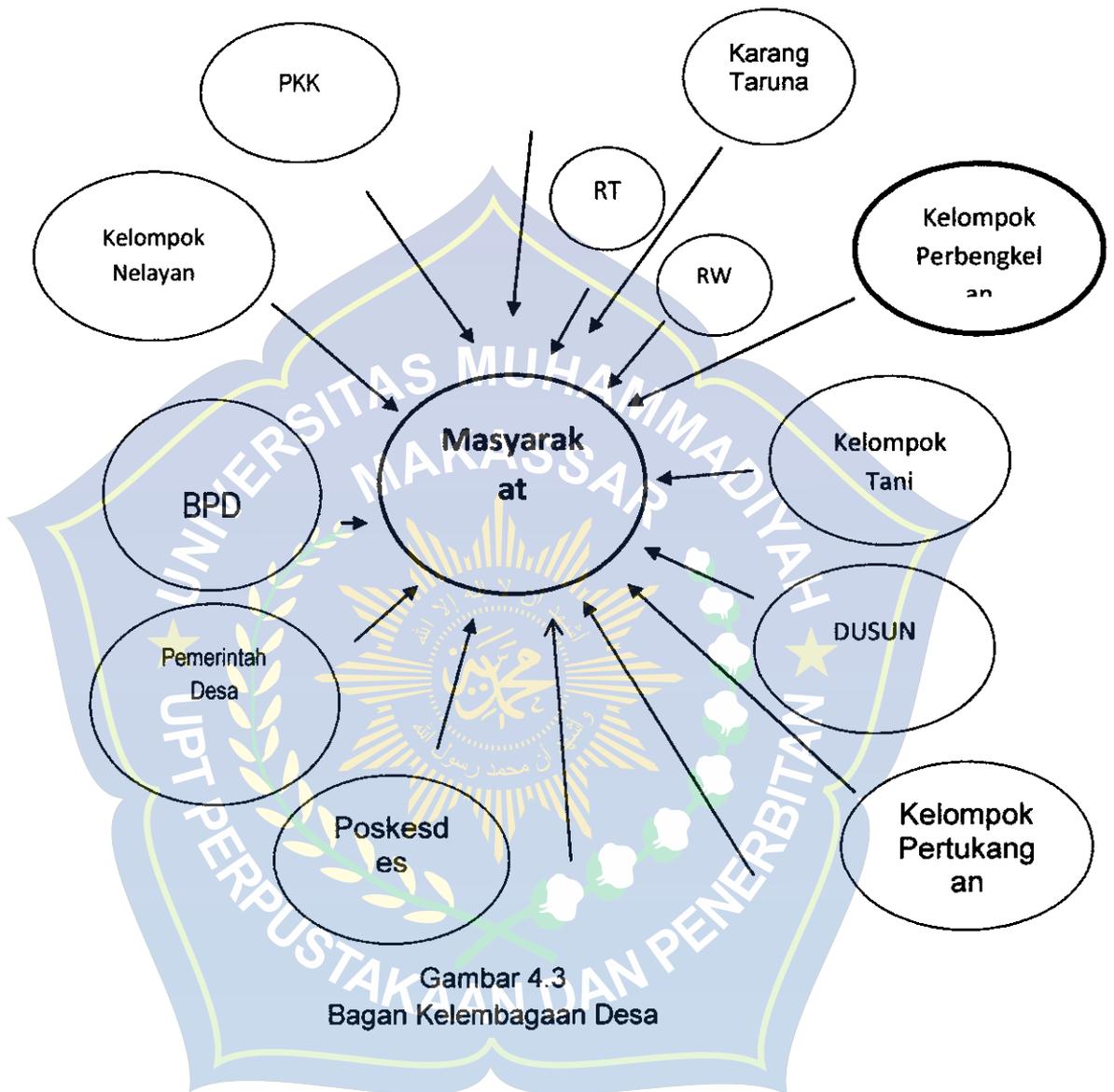
Sumber : Data Pengkajian Keadaan Desa

Tabel 4.8
Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim

No.	Masalah	Potensi
1.	Pada saat musim hujan terjadi banjir	- Saluran Air - Swadaya Masyarakat
2.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terkena penyakit	- Mantri - Bidan - Posyandu - Kader Posyandu
3.	Pada saat musim hujan banyak masyarakat terkena penyakit diare dan DBD (demam berdarah)	- Pos kesehatan desa - Bidan desa - Kader PKK - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Di delapan dusun pada musim kemarau kekurangan air bersih	- Mata air
5.	Pada musim kemarau kekurangan pangan penghasilan	- Sungai - Kebun - Laut

Sumber : Data Pengkajian Keadaan Desa

e. Masalah Dan Potensi Dari Kelembagaan Desa



Tabel 4.9
Masalah Dan Potensi D... mbagaan Desa

No	Lembaga	LKMD	Potensi
1	Pemdes	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Desa belum memiliki badan usaha yang mampu memberikan masukan/penghasilan kepada kas desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana tersedia
2	LKMD	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus LKMD sebagian tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3	Kelompok Tani	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya pengetahuan petani tentang teknologi tepat guna - Sarana prasarana menuju perkebunan sangat minim - Kegiatan Kelompok tani kurang aktif - Kurangnya pengetahuan masalah Pertanian dan alat pertanian - Banyaknya Babi berkeliaran di kebun warga - Kurangnya tanaman 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada Kelompok - Pengurus lengkap
4	Kelompok Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Kelompok Nelayan kurang aktif - Tidak ada tempat sandaran perahu (dermaga) - Ketidakmampuan membeli perlengkapan nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> - ada kelompok - Pengurus lengkap

5	Karang Taruna	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus Karang taruna tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana sangat minim 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
6	PKK	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus PKK tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial - Ada program kerja
7	Kelompok Pertukangan	<ul style="list-style-type: none"> - kelompok pertukangan Kurang aktif - Ketidakmampuan membeli alat pertukangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada kelompok - Pengurus lengkap
8	Kelompok Perbengkelan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang pengetahuan kelompok perbengkelan - Ketidakmampuan membeli alat perbengkelan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada kelompok - Pengurusnya lengkap
9	Kelompok Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak kelompok peternakan - Belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan - SDM
10	Bumdes	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang aktif - Kurang pengetahuan - Kurang memahami tugas dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada kelompok - Sarana dan prasarana ada - Pengurusnya lengkap

Sumber : Data Pengkajian Keadaan Desa

4. Visi dan Misi

a. Visi

Visi saya adalah terwujudnya pelayanan publik yang transparan menuju masyarakat Desa yang maju, sejahtera, tertib, aman serta berbudaya, berdaya saing dengan berbasis pada sumber daya lokal dan kearifan lokal

b. Misi

1. Melanjutkan program-program yang belum terwujud sebagaimana tercantum dalam dokumentasi RPJM Desa Pantama guna terwujudnya pembangunan yang merata.
2. Mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pemerintah desa yang baik, kemudian meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa pantama.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pantama di berbagai bidang.
 1. Bidang penyelenggaraan
Akan meningkatkan tunjangan RK/RT di desa pantama tanpa ada potongan.
 2. Bidang Pembangunan
 - Akan mengaktifkan kembali badan usaha desa (BUMDES) yang beberapa tahun dihentikan
 - Akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu termasuk bantuan rehab rumah yang tidak layak huni (Rutilahu)

- Memberikan ruang para pemuda dan pemudi dalam hal pembangunan di desa pantama guna tercapainya pembangunan yang kita harapkan di desa pantama.

3. Bidang pendidikan pemberdayaan

- Akan melaksanakan koordinasi dengan pihak pendidik pemerhati pendidikan dalam hal memberi bantuan kepada sekolah yang ada di desa secara bertahap.
- Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dalam hal memberi bantuan kepada sekolah yang ada di desa secara bertahap.

4. Bidang keagamaan

- Memberikan dan meningkatkan intensif kepada imam masjid, TKAT/TPA tanpa ada potongan
- Memberikan bantuan kepada masing-masing secara bertahap
- Akan mendatangkan guru tajwid di desa pantama

5. Bidang kesehatan/ kesejahteraan sosial

- Akan mengadakan mobil sehat untuk pelayanan masyarakat di desa
- Akan mengadakan kendaraan sampah di desa pantama guna tercapainya desa sehat
- Memberikan intensif kepada kader posyandu tanpa ada potongan

6. Bidang pertanian dan perikanan

- Mendorong usaha para petani dalam arti luas di desa pantama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

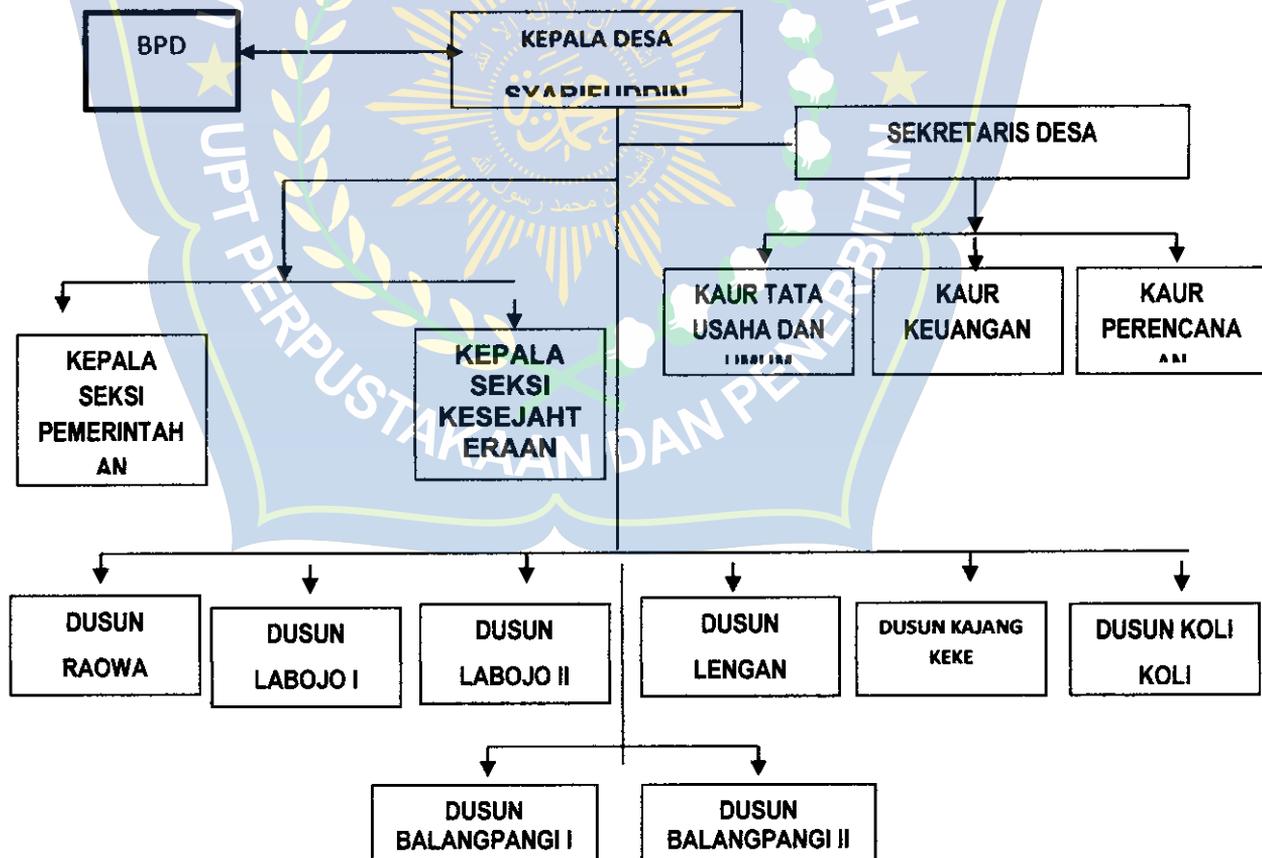
- Bagi masyarakat nelayan akan memberikan bantuan berupa perahu dan alat tangkap ikan secara bertahap guna menunjang kesejahteraan masyarakat nelayan

7. Budaya akan mempertahankan budaya dan kearifan lokal yang ada di desa pantama

8. Bidang pemuda dan keolahragaan

- Akan membentuk karang taruna di desa pantama
- Membangun sarana olahraga demi terbinanya kegiatan olahraga di desa pantama
- Akan menganggarkan anggaran keolahragaan di desa pantama.

5. Struktur Organisasi



Gambar 4.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pantama

6. Job Deskripsi

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah Adapun rincian tugas dari organisasi pemerintahan Desa Pertama yaitu sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Tugas dari Kepala Desa yaitu :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
4. Menetapkan peraturan desa
5. Menetapkan APBDES serta membina kehidupan masyarakat Desa
6. Menjaga hubungan kerjasama dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa mempunyai fungsi.

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti pengurusan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventaris, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
3. Melaksanakan urusan seperti administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi

keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala urusan tata usaha dan umum

1. Kaur tata usaha

Kaur tata usaha memiliki fungsi tugas seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat pengadinasian aset, inventaris, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

2. Kepala urusan keuangan

Memiliki tugas seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

3. Kepala urusan perencanaan

Memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Kasi pemerintahan

Bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas bidang pemerintahan desa melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.

5. Kasi kesos

Mempunyai tugas pembantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan, kesehatan masyarakat, generasi muda dan pemberdayaan perempuan dan olahraga.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Merupakan pedoman untuk mempertajam rumusan strategi guna menjadi pedoman pembangunan desa. Arah kebijakan pembangunan desa adalah hasil dari pengkajian secara komprehensif terhadap potensi dan masalah desa, isu strategis Desa/Kabupaten/Provinsi/Nasional, visi, misi dan strategi pembangunan desa yang akan menghasilkan program dan kegiatan prioritas bagi desa untuk dilaksanakan guna pencapaian tujuan pembangunan.

1. Arah kebijakan Pembangunan Tahun 2021

Kebijakan pembangunan tahun 2021 diarahkan kepada:

a. Peningkatan kapasitas infrastruktur

1. Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan.
2. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi.
3. Pengembangan perumahan dan permukiman.
4. Pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas Infrastruktur.
5. Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat.

6. Peningkatan kapasitas penanganan bencana.

b. Optimalisasi potensi unggulan daerah:

1. Peningkatan produksi pertanian dan tanaman pangan;

2. Peningkatan populasi ternak.

3. Peningkatan produksi perikanan.

4. Peningkatan produksi tanaman perkebunan.

5. Pembangunan sektor pariwisata.

c. Pengembangan ekonomi Masyarakat.

d. Pembangunan Bidang pendidikan.

e. Pembangunan kepemudaan, olahraga dan kebudayaan.

f. Pembangunan bidang kesehatan.

g. Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi.

2. Arah kebijakan Pembangunan 2022

Kebijakan yang diprioritaskan pada tahun 2022 adalah :

a. Pemantapan kehidupan beragama.

1. Pemenuhan sarana/ prasarana ibadah.

2. Pemeliharaan kerukunan beragama.

b. Peningkatan kapasitas infrastruktur daerah :

1. Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan.

2. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi.

3. Pengembangan perumahan dan permukiman.

4. Pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas infrastruktur.

5. Peningkatan kapasitas penanganan bencana.

3. Arah kebijakan Pembangunan 2023

Kebijakan yang diprioritaskan pada tahun 2023 adalah :

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Desa
- b. Pengembangan ekonomi Masyarakat.
- c. Optimalisasi potensi unggulan daerah.
- d. Pembangunan bidang pendidikan.
- e. Pembangunan kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan.
- f. Peningkatan infrastruktur.
- g. Pembangunan bidang kesehatan.
- h. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi.
- i. Pembangunan sektor pariwisata.

4. Arah kebijakan pembangunan tahun 2024

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2024 adalah :

- a. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat desa.
- b. Meningkatkan pelayanan pos terpadu kepada balita dan lansia.
- c. Tertib administrasi penduduk yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk terarahnya pemberian bantuan kesehatan pemerintah.
- d. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat melalui pengadaan sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat.
- e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.
- f. Peningkatan kesehatan ibu dan anak.
- g. Mempertahankan kondisi prasarana jalan, Tanggul, Talud dan drainase yang ada, baik jalan desa ataupun dusun dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaannya.

- h. Mengembangkan dan meningkatkan prasarana jalan dan drainase yang ada, baik jalan desa ataupun jalan dusun untuk memperlancar dan memudahkan transportasi untuk kepentingan masyarakat desa.
- i. Membuka dan membangun jalan, jembatan, Tanggul, Talud dan drainase yang baru untuk memudahkan transportasi.
- j. Mempertahankan kondisi sarana dan prasarana yang ada dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharannya.

5. Arah kebijakan pembangunan tahun 2025

Pada tahun 2025 akselerasi dilakukan pada kebijakan-kebijakan yang target kinerjanya masih jauh dari pencapaian guna mengejar pencapaian target kinerja tersebut pada akhir periode RPJMD. Adapun prioritas kebijakan pada tahun 2025 adalah:

- a. Pengembangan ekonomi Masyarakat.
- b. Optimalisasi potensi unggulan Desa.
- c. Pembangunan bidang pendidikan.
- d. Pembangunan kepemudaan dan olahraga dan kebudayaan.
- e. Pembangunan bidang kesehatan.
- f. Peningkatan kapasitas infrastruktur daerah.
- g. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan.

6. Arah kebijakan pembangunan tahun 2026

Tahun 2026 adalah tahun terakhir dari periode RPJMD 2020-2026. Pada tahun tersebut akan terselenggara pemilihan Kepala Desa secara bersamaan dengan beberapa Desa Lainnya. Karena itu kebijakan terakhir ketertiban dan demokrasi kembali menjadi prioritas pada tahun 2025. Selain itu, prioritas juga diberikan kepada target kinerja kebijakan yang belum tercapai pada tahun 2025. Adapun prioritas kebijakan pada tahun 2025 adalah :

- a. Pengembangan ekonomi Masyarakat.
- b. Optimalisasi potensi unggulan Desa.
- c. Pembangunan bidang pendidikan.
- d. Pembangunan kepemudaan dan olahraga dan kebudayaan.
- e. Pembangunan bidang kesehatan.
- f. Peningkatan kapasitas infrastruktur daerah.
- g. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan.

C. Arah Kebijakan Keuangan

Berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014, keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan, agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran.

Arah kebijakan keuangan Desa menjelaskan tentang aspek kebijakan

keuangan Desa guna mewujudkan Visi Dan Misi Desa yang telah ditetapkan.

1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer, pendapatan lain-lain dan pinjaman desa. Pendapatan Desa Pantama mengalami fluktuatif, untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Pantama. Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Pantama secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit maupun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDes terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat

surplus APBDes), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APBD mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APBDes), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
2. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
3. Mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan desa. Namun demikian sebelum melakukan pinjaman desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun);
 - b. Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki multiplier effect tinggi serta berjalan baik untuk masyarakat.

2. Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa secara tepat waktu pula;
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel;
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan Visi dan Misi Desa; dan
4. Alokasi anggaran Desa indikatif berdasarkan kemampuan keuangan Desa, Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan baik berupa belanja langsung dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat maupun belanja tidak langsung seperti belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.

3. Arah Kegiatan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit anggaran maupun surplus anggaran. Defisit anggaran terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus anggaran terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berorientasi keuntungan/profit dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat memperoleh bagi hasil laba, sehingga dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

D. Program dan Kegiatan Desa

Program Desa merupakan penjabaran dari arah kebijakan pembangunan Desa yang berisi kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program tersebut. Program Desa Pantama adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Program Desa Pantama

No	Sasaran	Strategi	Program
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik daerah yang berkeadilan.	Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas infrastruktur publik berbasis simpul jaringan internal dan eksternal Desa Pantama	Program Pembangunan Infrastruktur
	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dengan berbagai sektor pembangunan secara berkelanjutan.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip good governance.	Program pengembangan sarana dan prasarana dasar Pemukiman
		Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan	Program Informasi dan Telekomunikasi

		teknologi	
2.	Meningkatnya SDM di Pemerintahan Desa	Menerapkan metode pembinaan dan pembimbingan atau pendampingan langsung untuk melaksanakan percepatan pembangunan dalam aspek sosial budaya, penguatan kapasitas pemerintah desa dan penataan administrasi pemerintah desa	Program peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan dan komunikasi dan informatika.
	Meningkatnya produktivitas komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan masyarakat	Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.	Program peningkatan produktivitas komoditi pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
3	Meningkatnya tunjangan Rk/Rt di desa pantama tanpa ada	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas	Program Pemberdayaan

potongan	SDM	
	Peningkatan pola pengawasan terpadu terhadap proses penyelenggaraan	Program Pemberdayaan
Meningkatnya badan usaha desa (bumdes) yang beberapa tahun dihentikan akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu termasuk bantuan rehab rumah yang tidak layak huni (rutilahu)	Mengaktifkan kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang tidak optimal	Program Pemberdayaan
Memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu termasuk bantuan rehab rumah yang tidak layak huni (rutilahu)	Melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian kriteria dan persyaratan calon penerima bantuan	Program penanggulangan kemiskinan daerah

<p>Meningkatnya mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.</p>	<p>Memantapkan pelaksanaan wajib pendidikan dasar 9 tahun.</p>	<p>Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.</p>
	<p>Pemberian beasiswa pada siswa miskin, siswa berprestasi serta mahasiswa dan atlet olahraga berprestasi</p>	<p>Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga.</p>
<p>Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman nilai-nilai keagamaan, sosial Budaya dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</p>	<p>Meningkatkan peran dan partisipasi lembaga - lembaga sosial dan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan Sosial</p>	<p>Program Keagamaan</p>
<p>Meningkatnya kualitas, kuantitas, dan cakupan kesehatan masyarakat Desa Pantama</p>	<p>akan mengadakan mobil sehat untuk pelayanan masyarakat di desa</p>	<p>Program upaya kesehatan masyarakat</p>
	<p>akan mengadakan kendaraan sampah di desa pantama guna tercapainya desa sehat.</p>	<p>Program upaya kesehatan masyarakat</p>

	Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang lebih baik	Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian, dan perikanan.	Program peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik
	Meningkatnya produktivitas komoditi pertanian, dan perikanan masyarakat	Memberikan bantuan berupa perahu dan alat tangkap ikan secara bertahap guna menunjang kesejahteraan masyarakat nelayan	Program peningkatan produktivitas komoditi pertanian, dan perikanan masyarakat
	Meningkatnya pelestarian Adat dan Budaya	Pembinaan Adat dan Kebudayaan.	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
		Melaksanakan event seni secara berkala yang mengangkat budaya dan kearifan lokal dan memelihara situs sejarah dan benda kepurbakalaan.	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
	Meningkatnya prestasi	Mendorong peran dan	Program

olahraga yang profesional	kemandirian generasi muda dalam berorganisasi serta menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kebangsaan.	pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga.
Terwujudnya pembangunan fasilitas sarana dan prasarana olahraga.	Meningkatkan prestasi olahraga yang profesional dan mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam membangun fasilitas sarana dan prasarana olahraga.	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan salah satu unsur penting dalam proses kemajuan sebuah desa. Selain sebagai penggagas program-program desa, pemerintahan desa juga menjadi penggerak roda pembangunan desa. Untuk tercapainya hal tersebut, maka kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan.

Berikut ini merupakan beberapa program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pantama :

Tabel 4.11
Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pantama

NO	KEGIATAN
1	Belanja Pegawai
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa
3	Peningkatan Kelembagaan
4	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
5	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa
6	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa

a. Belanja Pegawai

Kegiatan belanja pegawai merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan biaya upah dan tunjangan pegawai desa meliputi kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa dan BPD. Pengelolaan biaya pegawai tersebut ditujukan untuk gaji, tunjangan kesehatan dan operasional pegawai desa.

b. Kegiatan Operasional Kantor Desa

Kegiatan operasional kantor desa dilakukan untuk kelancaran berjalannya proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan tersebut meliputi belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kegiatan belanja barang dan jasa tersebut digunakan untuk keperluan seperti belanja ATK, perawatan fasilitas, operasional kantor dan lain-lain. Sedangkan belanja modal digunakan untuk pengadaan barang sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan.

c. Peningkatan Kelembagaan Desa

Kelembagaan merupakan salah satu unsur penting dalam membantu berjalannya proses kemajuan desa. Oleh karena itu, maka dibutuhkan peningkatan dalam kelembagaan desa agar kegiatan kelembagaan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Adapun program-program yang dilakukan untuk meningkatkan kelembagaan diantaranya meliputi peningkatan SDM, Pelatihan, serta pengelolaan sarana dan prasarana.

d. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan sebagai media untuk saling bertukar pikiran dan penyampaian aspirasi dari masyarakat untuk pemerintah desa. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

e. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan desa. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan pembangunan desa agar dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun pelaksanaan perencanaan pembangunan desa ini biasanya dilakukan melalui forum musyawarah desa.

f. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa

Kegiatan pengelolaan informasi desa dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa tentang apa saja program-program yang sudah dilaksanakan pemerintah. Serta untuk memudahkan masyarakat maupun pemerintah pusat dalam memantau perkembangan desa. Kegiatan pengelolaan informasi desa ini dapat berwujud media cetak maupun media elektronik seperti website dan media sosial. Di Desa Amin Jaya sendiri sudah memiliki website resmi yang dapat diakses oleh masyarakat kapan saja, yaitu "*desa-pantama@gmail.com*". Melalui website resmi ini, masyarakat dapat mengetahui perkembangan serta apa saja yang terjadi di Desa Amin Jaya secara *up to date*.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- a. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa
- b. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
- c. Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Aparatur Desa
- d. Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sarana Air Bersih
- e. Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Fasilitas Prasarana Lingkungan

- g. Kegiatan Pengembangan informasi dan Komunikasi
- h. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Desa.
- i. Program Pembinaan Pemerintahan Desa
- j. Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan
- k. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- l. Program Pemberdayaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
- m. Program Peningkatan Kelembagaan di Pedesaan

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- b. Kegiatan Pembinaan Pemuda Dan Olahraga
- c. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Dan Pkk
- d. Kegiatan Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya
- e. Kegiatan Pembinaan Umat Beragama
- f. Kegiatan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban
- g. Kegiatan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
- h. Kegiatan Peringatan Dan Perayaan Hari Besar

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
- b. Pelatihan teknologi tepat guna
- c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa
- d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
- e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

- f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
- h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :

1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
3. Kelompok Perempuan
4. Kelompok Tani
5. Kelompok Masyarakat Miskin
6. Kelompok pengrajin/keterampilan khusus
7. Kelompok perlindungan anak
8. Kelompok Pemuda
9. Kelompok Kesenian
10. Kelompok Keagamaan
11. Kelompok Simpan Pinjam
12. Kelompok Tenaga Pengajar
13. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, Dan Mendesak

- a. Penguatan kerjasama pemerintah Desa dan lembaga yang terkait dengan penanganan bencana dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana.
- b. Pelatihan tanggap darurat bencana.
- c. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
- d. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Longsor.

E. Hasil Penelitian

1. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

a. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat

Dalam menampung partisipasi tentunya dibutuhkan sebuah forum atau media untuk menyalurkan aspirasi. Forum tersebut sebagai wadah untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan dan meningkatkan aspirasi. Desa Pantama Kecamatan Kajang aktif melaksanakan musrembang sebagai forum bagi masyarakat untuk menyalurkan partisipasi didukung oleh pernyataan sekretaris Desa Pantama **Muhammad Arsyad Djm., Sos** tentang keaktifan pelaksanaan dan ketersediaan forum :

"Iya, musrembang aktif dilaksanakan setiap tahunnya sebagai langkah pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat". Selanjutnya **Muhammad Arsyad Djm., Sos**, menyatakan bahwa *"selain musrembang ada forum untuk menampung aspirasi masyarakat"*.

Pernyataan yang sama disampaikan ketua BPD Desa pantama **Ambo Adi Solong** yang menyatakan bahwa *"Musrembang aktif dilaksanakan, ini kita lakukan emm apa namanya, sebagai upaya untuk memberi kesempatan bagi warga untuk memberi masukan mengenai pembangunan Desa".* Selanjutnya dalam menarik minat masyarakat untuk ikut musrembanga Pantama Ambo Adi Solong menyatakan *"emmm, sebelum musrembang kami surati untuk mengundang tokoh masyarakat, pemuda, ibu ibu PKK, dan lain lain sambil cerita cerita begitu, kalo musrembang penting"*

Lebih lanjut pernyataan lainnya dari tokoh pemuda Ketua Karang Taruna Ahmadi yang menyatakan bahwa *"Iya Musrembang, dilaksanakan setiap tahun, kami bersama tokoh masyarakat dan pemuda diundang"*.

b. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses

Dalam kegiatan musrembang masyarakat mampu terlibat dalam proses terjadinya partisipasi, hal tersebut disertai dengan keahlian dalam forum saat berpartisipasi dalam kegiatan musrembang. Didukung oleh pernyataan **Ketua Karang Taruna Ahmadi** tentang keterlibatan, keaktifan, dan keahlian dalam kegiatan musrembang bahwa *"iya saya terlibat saat musrembang dilaksanakan"*. Selanjutnya *"eee kalo soal keahlian saya tidak tau pasti, heheh tapi saya bersama teman teman aktif berbicara dan menyampaikan pendapat saat diberi kesempatan"*

Pernyataan lainnya, disampaikan oleh **Kepala Dusun Ardianto** bahwa *"saya terlibat, saya juga diberi kepercayaan bagi warga Dusun saya untuk menyampaikan keluhannya, jadi saya aktif berbicara di forum"*.

Selanjutnya dari **ketua PKK Desa Pantama Ibu Eni** bahwa *"iya terlibat, saya kalo ada mau kusampaikan ku usahakan untuk sampaikan supaya bisa dipertimbangkan apa apa yang kuusulkan, saya juga aktif berbicara kalau dipersilahkan"*

c. Adanya akses bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam kegiatan musrembang masyarakat diberikan akses dan kesempatan serta dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini masyarakat diberikan kebebasan untuk masuk dalam area *Good Governance* Dan berpengaruh dalam penentuan kebijakan termasuk mengelola barang publik. Hal ini sejalan dengan pernyataan **Bapak Zaenuddin** sebagai tokoh masyarakat tentang kebebasan akses dalam menyampaikan pendapat dan kebebasan mengelola barang publik, bahwa

“saya diberikan kesempatan untuk bercerita, punna lanijojjoki accarita jakl” selanjutnya beliau menyatakan bahwa *“saya sebagai tokoh masyarakat diberi kesempatan untuk menggunakan barang dari pemerintah, seperti jaring untuk menangkap ikan dan alat alat lain untuk melaut”*.

Pernyataan yang sama disampaikan oleh **Kahar** sebagai tokoh masyarakat *“iya betul, kami diberikan kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat, tapi biasanya tunggu giliran”*, selanjutnya *“untuk barang publik yang bisa dipakai masyarakat kami bebas gunakan, misalnya kalau ada takziah bisaki ambil kursi dan tenda di kantor desa”*

Selanjutnya **ketua karang taruna Ahmadi** tentang kewenangan mengajukan pendapat dan pengambilan keputusan, menyatakan bahwa *“iyaa, kami sebagai peserta forum diberikan wewenang dalam mengajukan pendapat termasuk dalam proses pengambilan keputusan tentang hasil musrembang”*.

d. Faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan musrembang

Dalam kegiatan pelaksanaan musrembang tentunya tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat kegiatan musrembang, mulai dari sebelum kegiatan, proses berjalannya musrembang, sampai paska pelaksanaan musrembang. Berikut pernyataan dari **ketua PKK Ibu Eni** tentang pentingnya kegiatan musrembang bahwa *“Musrembang itu penting diikuti dan dilaksanakan, karena keluhan keluhan dari masyarakat bisa disampaikan lalu dibahas di forum”*

Selanjutnya **Kahar** sebagai tokoh masyarakat tentang solidaritas masyarakat untuk ikut musrembang menyatakan bahwa *“iya sejauh ini kami sebagai*

masyarakat solidji mengikuti kegiatan, emm jadi setiap ada pasti ikutka, kalo diundang (sambil tertawa)”.

Pernyataan lainnya dari ketua BPD Desa Pantama tentang dukungan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan musrembang **Ambo Adi Solong menyatakan** bahwa *“Sejauh ini pemerintah mendukung penuh kegiatan musrembang, saya selaku ketua badan permusyawaratan desa bisa menampung keluhan keluhan atau pendapat dari masyarakat”.* Pernyataan yang sama disampaikan oleh **kepala Dusun Adianto**, bahwa *“iya, pemerintah mendukung penuh kegiatan musrembang, kama suntikan dana setiap pembangunan itu dari pemerintah”*

Sekretaris desa Muhammad Arsyad Djm.,S.sos, bahwa *“sejauh ini secara teknis dalam pelaksanaan kegiatan belum ada, termasuk dalam hal partisipasi peserta yang diundang hampir semuanya menghadiri kegiatan”.*

e. Pernyataan pendukung tentang partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrembang dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber, Berikut pernyataan Sekretaris Desa Pantama **Muhammad Arsyad Djm.,S.sos** tentang pentingnya kegiatan musrembang dan realisasi aspirasi masyarakat, menyatakan bahwa *“Musrembang penting untuk dilaksanakan, selain karena merupakan program wajib dari pemerintah, juga musrembang sebagai forum untuk membahas sasaran pembangunan atau alokasi dana desa akan dialihkan kemana”, dan “semua aspirasi kita catat dan tampung akan tetapi untuk realisasi karena berbagai kendala salah satunya keterbatasan dana jadi yahhh tidak semua terealisasi hanya yang benar benar diprioritaskan, untuk yang belum sempat*

kami penuh akan masuk dalam rencana penganggaran di tahun selanjutnya, insyaAllah". Pernyataan yang sama oleh Zaenuddin menyatakan bahwa "iya sangat penting, disitu dilihat dana dari pemerintah dikemanakan, kita juga sampaikan apa apa yang dibutuhkan masyarakat"

Selanjutnya **Ardianto Kepala Dusun** , tentang dampak positif adanya musrembang menyatakan bahwa *"iya musrembang berdampak positif disemua sektor"* dan *"iya karena adanya musrembang kebutuhan masyarakat yang kita sampaikan bisa didengarkan pemerintah jadi masyarakat bisa kita bantu"*

Lebih lanjut lagi ketua **BPD Ambo Adi Solong** menyatakan bahwa *"Berkat musrembang apa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita bahas di forum dan diupayakan terpenuhi sehingga masyarakat bisa terbantu."*

2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembanga)

a. Perencanaan

Perencanaan musrembang adalah persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Berikut pernyataan dari Sekertaris Desa terkait tahapan perencanaan Musrembanga Arsyad Djm.,S.sos, bahwa *"jadi sebelum kegiatan kami siapkan dulu RPJM , emm lalu buat jadwal, setelah itu menugaskan pemerintah setempat tingkat Dusun dan dibawahnya untuk memantau tokoh masyarakat, pemuda, dan wanita yang diundang, lalu membuat berita acara didalamnya ada kegiatan prioritas, setelah jadwal disepakati kita bagikan dokumen rencana kerja pembangunan Desa".*

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah eksekusi kegiatan musyawarah rencana pembangunan Desa. Berikut pernyataan dari Sekertaris Desa terkait

tahapan pelaksanaan Musrembang Arsyad Djm., S.sos, bahwa "pada saat pelaksanaan peserta terlebih dahulu mengisi daftar hadir, lalu kita buka acara, diawali pemaparan camat disertai evaluasi pembangunan tahun lalu, terus pemaparan Kepala Desa tentang prioritas pembangunan, RPJM dan ADD, kemudian peserta diminta menyuarakan aspirasi dan masalah yang dihadapi, setelahnya kita bahas dan tetapkan masalah yang menjadi prioritas pembangunan di tahun selanjut

F. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat merupakan proses kepesertaan seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan dimulai dari tahap memberikan masukan, membuat keputusan dalam proses perencanaan, dan pengelolaan pembangunan termasuk didalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, mengevaluasi hasil pembangunan dan merasakan manfaat yang diperoleh dari proses pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Forum Partisipasi

Forum partisipasi merupakan wadah untuk menampung seluruh aspirasi dari masyarakat sehingga dapat didengar, dipertimbangkan, dan diwujudkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dari pernyataan informan kunci maka dapat dikatakan bahwa adanya ketersediaan forum partisipasi masyarakat disertai dengan usaha yang

dilakukan Pemerintah Desa Pantama untuk mengundang tokoh masyarakat ikut serta hadir mengikuti kegiatan dengan demikian dapat dikatakan kegiatan musrembang aktif dilaksanakan setiap tahunnya telah memenuhi indikator untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam musrembang.

b. Keterlibatan Proses

Keterlibatan proses mengandung arti bahwa masyarakat mampu terlibat dalam kegiatan musrembang yang aktif diselenggarakan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara dari pernyataan informan kunci maka dapat dikatakan bahwa masyarakat desa pantama ikut serta terlibat dalam pelaksanaan musrembang disertai dengan keaktifan dalam forum dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Pantama, dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat mampu terlibat dalam proses terjadinya partisipasi telah memenuhi indikator untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam musrembang.

c. Ketersediaan Akses

Ketersediaan akses mengandung arti bahwa masyarakat diberikan akses atau kesempatan dalam berpendapat termasuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dari pernyataan informan kunci baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat maka dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa Pantama memberikan akses seluas luasnya bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat termasuk dalam kegiatan pengambilan keputusan dan kebijakan rencana pembangunan Desa, dengan demikian

dapat dikatakan bahwa ketersediaan akses telah memenuhi indikator untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam musrembang.

d. Faktor Pendukung, Penghambat, dan Pernyataan Pendukung

Faktor pendukung adalah faktor yang mempermudah pelaksanaan kegiatan musrembang, faktor penghambat dalam faktor yang menjadi hambatan pemerintah maupun masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan musrembang, serta pernyataan pendukung adalah pernyataan penting lainnya yang berkaitan partisipasi maupun hasil dari partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dari pernyataan informan kunci baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat maka dapat dikatakan secara teknis tidak ada hambatan dalam kegiatan pelaksanaan. Masyarakat turut serta dan paham akan pentingnya musrembang untuk digelar dan diikuti, begitupun dengan solidaritas, masyarakat memiliki jiwa solidaritas tinggi terlibat dalam musrembang. Adanya musrembang juga memiliki dampak positif di semua sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat, meskipun tidak semua aspirasi terlaksanakan karena keterbatasan dana dan waktu pelaksanaan akan tetapi yang menjadi prioritas pembangunan mampu terealisasi dengan baik.

2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa direncanakan yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran untuk membangun kesepahaman tentang kepentingan dan

kemajuan desa, dengan cara melihat potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar Desa.

d. Perencanaan Musrembang

Perencanaan musrembang adalah persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara dari pernyataan informan kunci dari pihak pemerintah Desa Pantama bahwa proses perencanaan musrembang melalui tahapan :

1. Menyiapkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM),
2. Menentukan jadwal kegiatan
3. Menentukan peserta kegiatan
4. menyiapkan berita acara kegiatan
5. Membagikan dokumen rencana kerja pembangunan Desa.

e. Pelaksanaan Musrembang

Pelaksanaan adalah eksekusi kegiatan musyawarah rencana pembangunan Desa. Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara dari pernyataan informan kunci dari pihak pemerintah Desa Pantama bahwa proses pelaksanaan musrembang melalui tahapan :

1. pengisian dan pendaftaran peserta hadir
2. sambutan, pemaparan dan evaluasi camat terkait pembangunan anggaran tahun sebelumnya
3. sambutan, pemaparan RPJM termasuk prioritas pembangunan dan Alokasi Dana Desa,
4. Pemaparan masalah dan aspirasi dari peserta kegiatan
5. Pembahasan hasil musrembang

6. Penetapan RPJM, prioritas pembangunan, dan Sasaran Alokasi dana Desa.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara dengan Judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba)” sehingga dapat disimpulkan :

- 1. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa**
 - a. Hasil wawancara mengenai forum partisipasi mengindikasikan bahwa di Desa pantama menyediakan forum aktif dalam menampung aspirasi masyarakat melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrembang).
 - b. Hasil Wawancara mengenai ketersediaan akses mengindikasikan bahwa pemerintah Desa Pantama memberikan kebebasan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrembang)
 - c. Hasil Wawancara mengenai keterlibatan proses mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Pantama melalui perwakilan kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, PKK, dan lain lain aktif terlibat dalam mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrembang).
 - d. Hasil wawancara mengenai faktor pendukung, penghambat, serta pernyataan pendukung lainnya mengindikasikan bahwa dalam

e. pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrembang) tidak memiliki hambatan secara teknis, berdampak positif pada semua sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan masyarakat memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya kegiatan, serta kebutuhan yang diprioritaskan mampu terealisasi dengan baik.

2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa pantama partisipatif dan berjalan secara sistematis dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrembang).

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Pantama

Pemerintah Desa pantama diharapkan terus mendorong masyarakat untuk ikut serta dan aktif dalam kegiatan musrembang, serta menghadirkan tokoh masyarakat yang berbeda sehingga semua aspirasi dalam masyarakat bisa tersampaikan.

2. Masyarakat

Masyarakat Desa Pantama diharapkan untuk terus ikut serta dalam kegiatan musrembang sehingga aspirasi bisa tersalurkan sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat berpotensi masuk dalam rencana pembangunan desa yang bersumber dari ADD dan APBDes.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan indikator yang berbeda untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat untuk memperluas wawasan dan menambah ilmu terkait partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad et,al 2015 . *Evaluation Of Reliability And Validity Of The General Practice Phisycal Activity Questionnaire (GPPAQ) In 60-70 Year old Primary Care Patients. BMC Family Practice*, 16(113),1-9
- Andi Ashabul Kahfi 2020. *Analisis Efektivitas Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba)*. Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Andi Uceng, Erfina , Ahmad Mustanir , Sukri 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Jurnal Moderat* ISSN: 2442-3777.
- Arimbi, Mas, Achmad. 2015. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Azhar, Fikri, 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya*. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga. ISSN: 2303-341X.
- Baso Frianto Wibowo 2015. *Partisipasi masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan(Musrempang) Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten Wajo*. Universitas Islam Negeri.
- Dea Deviyanti 2013. *Studi tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*. Ejournal Administrasi Negara, ISSN:0000-0000.
- Deviyanti, D. 2013. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*. EJournal Administrasi Negara, 1(2).
- Elida Imron Atin Nur Laily 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif* . ADLN- Perpustakaan Universitas Airlangga.
- Hadi Suroso, Abdul Hakim, Irwan Noor 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik*. *Jurnal Sosial dan Humaniora*. ISSN: 1411-0199.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad et,al 2015 . *Evaluation Of Reliability And Validity Of The General Practice Phisycal Activity Questionnaire (GPPAQ) In 60-70 Year old Primary Care Patients*. *BMC Family Practice*, 16(113),1-9
- Andi Ashabul Kahfi 2020. *Analisis Efektivitas Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba)*. Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Andi Uceng, Erfina , Ahmad Mustanir , Sukri 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Jurnal Moderat* ISSN: 2442-3777.
- Arimbi, Mas, Achmad. 2015. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Azhar, Fikri, 2015.*Partisipasi Masyarakat Dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya*. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga. ISSN: 2303-341X.
- Baso Frianto Wibowo 2015. *Partisipasi masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan(Musrempang) Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten Wajo*. Universitas Islam Negeri.
- Dea Deviyanti 2013. *Studi tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*. *Ejournal Administrasi Negara*, ISSN:0000-0000.
- Deviyanti, D. 2013. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*. *EJournal Administrasi Negara*, 1(2).
- Elida Imron Atin Nur Laily 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif* . ADLN- Perpustakaan Universitas Airlangga.
- Hadi Suroso, Abdul Hakim, Irwan Noor 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik*. *Jurnal Sosial dan Humaniora*. ISSN: 1411-0199.

- Ita Puspita sari 2016. *Implementasi Pembangunan Partisipatif (Studi kasus di Kelurahan Andowia Kabupaten Konawe Utara)*. *Jurnal Ekonomi Uho*. Vol 1, No .1.
- Joni Dwi Putro 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus pada Desa, Jatipurno, Wonogiri*.
- Laily, E. I. N 2015 *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Kebijakan Dan Manajemen Publik*,3(3),300.
- Latif, A., Rusdi I.,M., Mustanir, A.,& Sutrisno,M. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang*, *Jurnal Moderat*,5(1),3.
- Muh Firyal Akbar, Srihandayani Suprpto, Surati 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo*. *Jurnal Ilmu Administrasi*. ISSN: 2301-573X.
- Muhammad Eko Atmojo 2017. *Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo*. *Jurnal umpo*, FISIP Universitas Muhammadiyah .Yogyakarta. 7/ Vol 5. No. 1.
- Mubyarto, et, al, 2015. *Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan, Kajian Bersama Pengembangan Kebijakan*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Mustanir, A., & Abadi, P,(2017).*Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang*, *Jurnal Politik Profetik*, 5(2).
- Mustanir, A., Yasin, A., Irwan,& Rusdi, M. 2018. *Potret Irisan Bumi Desa Tonrong Rijang Dalam Transect Pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif*, *Jurnal Moderat*, 4(4).
- Mustranir, A., & Razak., M.R.R.2017. *Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan. Konferensi Nasional ke-6 & Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah' Aisyiyah (APPPTM)*.
- Paselle, E. 2013. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif: Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara*. *Jurnal Paradigma*, 2(1), : 10-25.

Sari, I. P, Santoso Sastroepoetra. 2016. *Implementasi Pembangunan Partisipatif (Studi Kasus Di Kelurahan Andowia Kabupaten Konawe Utara)*.
Jurnal Ekonomi(JE),1(1), 179-188.

Satries, W. I. 2011. *Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang*.
Jurnal Kybernan,Vol. 2, No. 2.

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,
Bandung.Afabeta.

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung CV
Alfabeta.





Pedoman Wawancara

Nama : Ambo Adi Solong

Umur : 58

Pekerjaan : wiraswasta

Jabatan : Ketua BPD

Daftar Pertanyaan

1. PARTISIPASI

A. Forum Partisipasi

1. Apakah kegiatan musrembang aktif dilaksanakan di Desa Pantama ?

Tanggapan : *Musrembang aktif dilaksanakan, ini kita lakukan emm apa namanya, sebagai upaya untuk memberi kesempatan bagi warga untuk memberi masukan mengenai pembangunan Desa".*

2. Apa langkah yang ditempuh pemerintah dalam menarik minat masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan musrembang ?

Tanggapan : *emm, sebelum musrembang kami surati untuk mengundang tokoh masyarakat, pemuda, ibu ibu PKK, dan lain lain sambil cerita cerita begitu, kalau musrembang penting.*

B. Faktor Pendukung dan penghambat

3. Apakah pemerintah mendukung penuh kegiatan musrembang ?

Tanggapan : *Sejauh ini pemerintah mendukung penuh kegiatan musrembang, saya selaku ketua badan permusyawaratan desa bisa menampung keluhan keluhan atau pendapat dari masyarakat".*

C. Pertanyaan pendukung

4. Apakah kegiatan murembang memberikan dampak positif bagi masyarakat dari sektor ekonomi, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat ?

Tanggapan : *Berkat musrembang apa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita bahas di forum dan diupayakan terpenuhi sehingga masyarakat bisa terbantu.*

Pedoman Wawancara

Nama : Muhammad Arsyad DJM S.Sos

Umur : 58

Pekerjaan : PNS

Jabatan : Sekretaris Desa

Daftar Pertanyaan

2. PARTISIPASI

B. Forum Partisipasi

5. Apakah kegiatan musrembang aktif dilaksanakan di Desa Pantama ?

Tanggapan : *Iya, musrembang aktif dilaksanakan setiap tahunnya sebagai langkah pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat”.*

6. Apakah ada forum lain selain Musrembang dalam menampung aspirasi masyarakat?

Tanggapan : *selain musrembang ada forum untuk menampung aspirasi masyarakat.*

C. Faktor Pendukung dan penghambat

7. Apakah masyarakat atau saudara sadar akan pentingnya kegiatan musrembang ?

Tanggapan : *Musrembang penting untuk dilaksanakan, selain karena merupakan program wajib dari pemerintah, juga musrembang sebagai forum untuk membahas sasaran pembangunan atau alokasi dana desa akan dialihkan kemana”, dan “semua aspirasi kita catat dan tampung akan tetapi untuk realisasi karena berbagai kendala salah satunya keterbatasan dana jadi yahhh tidak semua terealisasi hanya yang benar benar diprioritaskan, untuk yang belum sempat kamienuhi akan masuk dalam rencana penganggaran di tahun selanjutnya, insyaAllah*

8. pelaksanaan kegiatan musrembang ?

Tanggapan : *sejauh ini secara teknis dalam pelaksanaan kegiatan belum ada, termasuk dalam hal partisipasi peserta yang diundang hampir semuanya menghadiri kegiatan”.*

D. Pertanyaan pendukung

9. Apakah kegiatan musrembang penting untuk dilaksanakan ?

Tanggapan : *"Musrembang penting untuk dilaksanakan, selain karena merupakan program wajib dari pemerintah, juga musrembang sebagai forum untuk membahas sasaran pembangunan atau alokasi dana desa akan dialihkan kemana"*,



Pedoman Wawancara

Nama : Ardianto

Umur : 30

Pekerjaan : Wirausaha

Jabatan : Kepala Dusun

Daftar Pertanyaan

1. PARTISIPASI

A. Forum Partisipasi

10. Apakah kegiatan musrembang aktif dilaksanakan di Desa Pantama ?

Tanggapan : Apakah ada forum lain selain Musrembang dalam menampung aspirasi masyarakat?

Tanggapan : *selain musrembang ada forum untuk menampung aspirasi masyarakat.*

B. Keterlibatan Proses

11. Apakah Saudara aktif dalam forum kegiatan musrembang ?

Tanggapan : *saya terlibat, saya juga diberi kepercayaan bagi warga Dusun saya untuk menyampaikan keluhannya, jadi saya aktif berbicara di forum.*

C. Pertanyaan pendukung

12. Apakah kegiatan murembang memberikan dampak positif bagi masyarakat dari sektor ekonomi, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat ?

Tanggapan: *iya musrembang berdampak positif disemua sector dan iya karena adanya musrembang kebutuhan masyarakat yang kita sampaikan bisa didengarkan pemerintah jadi masyarakat bisa kita bantu.*

Pedoman Wawancara

Nama : Akhmadi
Umur : 25
Pekerjaan : Wirausaha
Jabatan : Ketua Karang Taruna

Daftar Pertanyaan

2. PARTISIPASI

A. Keterlibatan Proses

1. Apakah saudara terlibat dalam kegiatan musrembang ?

Tanggapan : *iya saya terlibat saat musrembang dilaksanakan, "eee kalau soal keahlian saya tidak tahu pasti, heheh tapi saya bersama teman teman aktif berbicara dan menyampaikan pendapat saat diberi kesempatan.*

B. Ketersediaan Akses

3. Apakah masyarakat atau saudara diberikan kebebasan akses dalam menyampaikan pendapat ?

Tanggapan : *lyaa, kami sebagai peserta forum diberikan wewenang dalam mengajukan pendapat termasuk dalam proses pengambilan keputusan tentang hasil musrembang,*

Pedoman Wawancara

Nama : Nuraeni

Umur : 38

Pekerjaan : PNS

Jabatan : Ketua PKK

Daftar Pertanyaan

1, PARTISIPASI

A. Keterlibatan Proses

- 1 Apakah saudara terlibat dalam kegiatan musrembang ?

Tanggapan : *iya saya terlibat, saya kalau ada mau kusampaikan ku usahakan untuk sampaikan supaya bisa dipertimbangkan apa apa saja yang kuusulkan, saya juga aktif berbicara kalau dipersilahkan.*

B. Faktor Pendukung dan penghambat

- 2 Apakah masyarakat atau saudara sadar akan pentingnya kegiatan musrembang ?

Tanggapan : *musrembang itu penting diikuti dan dilaksanakan, karena keluhan dari masyarakat bisa disampaikan lalu dibahas di forum.*

Daftar Informan

No	Nama	Usia	Jabatan	Pekerjaan
1	Muh. Arsyad Djm, S.sos		Sekretaris Desa	PNS
2	Ambo Adi Solong		Ketua BPD	Wiraswasta
3	Ardianto		Kepala Dusun	Wiraswasta
4	Zaenuddin		Toko Masyarakat	Wiraswasta
5	Kahar		Toko Masyarakat	Wiraswasta
6	Nuraeni		Ketua PKK	PNS
7	Ahmadi		Ketua Karang Taruna	Wiraswasta



Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Surat Penelitian

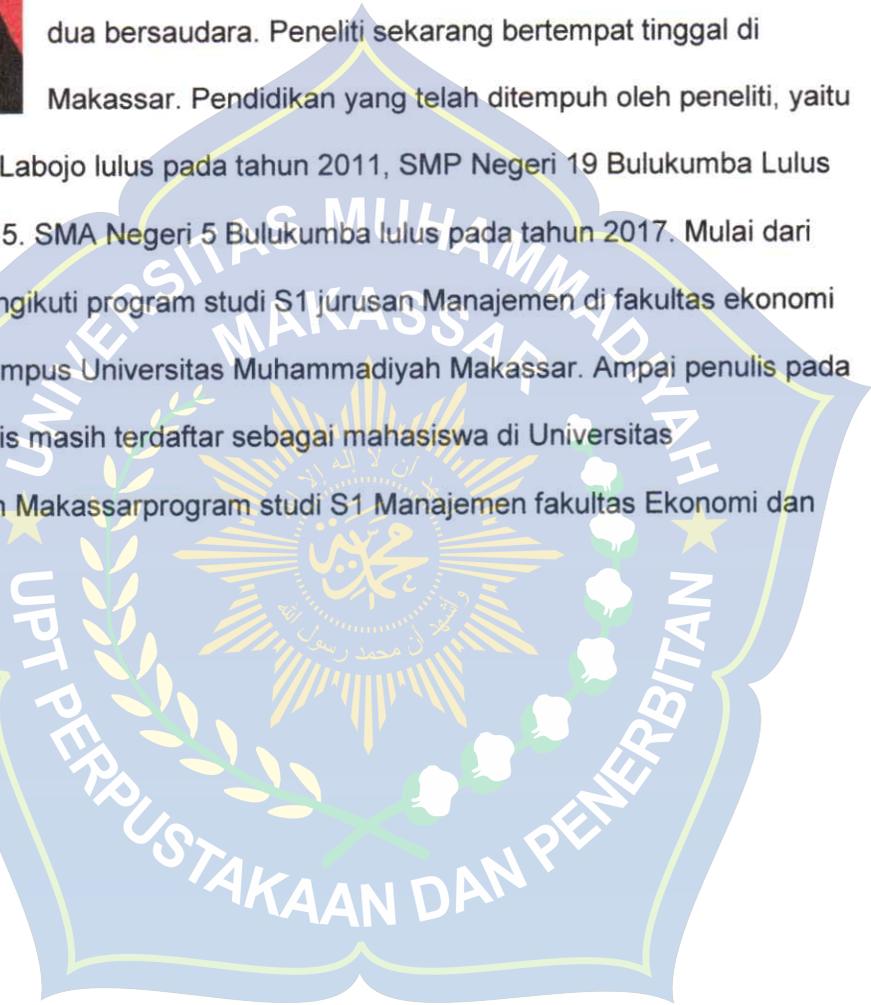


BIOGRAFI PENULIS



Yulia Cahaya Fatima nama panggilan Tima lahir di Pantama pada tanggal 08 Juli 1999 putri dari pasangan Bapak Rajaning dan Ibu Raden. Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Makassar. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti, yaitu

SD Negeri 106 Labajo lulus pada tahun 2011, SMP Negeri 19 Bulukumba Lulus pada tahun 2015. SMA Negeri 5 Bulukumba lulus pada tahun 2017. Mulai dari tahun 2017 mengikuti program studi S1 jurusan Manajemen di fakultas ekonomi dan bisnis di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Sampai penulis pada skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar program studi S1 Manajemen fakultas Ekonomi dan Bisnis.



ORIGINALITY REPORT

9%	7%	0%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	6%
2	eprints.undip.ac.id Internet Source	4%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%



ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX

19%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.unhas.ac.id
Internet Source



19%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



ORIGINALITY REPORT

8%	8%	2%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	adoc.pub Internet Source	2%
2	doku.pub Internet Source	2%
3	repository.utu.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%

Exclude quotes On Exclude matches 2%
Exclude bibliography On



ORIGINALITY REPORT

5%	3%	2%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	3%
2	wonokerto-gucialit.lumajangkab.go.id Internet Source	2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

On
On

Exclude matches < 2%



ORIGINALITY REPORT

2%	2%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
---	---	----

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

